

**HUBUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN
MONETER DENGAN INFLASI DI INDONESIA
PERIODE 2005Q1 S/D 2015Q4**

SKRIPSI

Disusun oleh :

BAGUS KURNIAWAN

135020401111049

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

"Hubungan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dengan Inflasi di Indonesia
Periode 2005Q1 s/d 2015Q4"

Yang disusun oleh :

Nama : Bagus Kurniawan
NIM : 135020401111049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

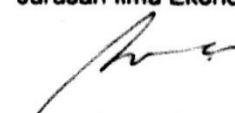
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **18 Mei 2017** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Shofwan, SE., M.Si
NIP. 197305172003121002
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. Agus Suman, SE., DEA.
NIP. 196006151987011001
(Dosen Penguji I)
3. Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D.
NIP. 197009221995121002
(Dosen Penguji II)



Malang, 24 Mei 2017
Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Hubungan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dengan Inflasi di
Indonesia Periode 2005Q1 s/d 2015Q4**

Yang disusun oleh :

Nama : Bagus Kurniawan
NIM : 135020401111049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001

Malang, 2 Mei 2017
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Shofwan, S.E., M.Si.
NIP. 197305172003121002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Bagus Kurniawan
Tempat, tanggal lahir : Karang anyar, 13 Maret 1995
NIM : 135020401111049
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan
Alamat : Jl. Bunga Srigading Dalam No.26

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Hubungan Kebijakan Fiskal dan Moneter dengan Inflasi di Indonesia Periode
2005Q1 s/d 2015Q4**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 April 2017

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Shofwan, S.E., M.SI
NIP. 19730517 200312 1 002

Yang memhuet pernyataan,



Bagus Kurniawan
NIM. 135020401111049



Mengetahui,
Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,

Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001

RIWAYAT HIDUP



Nama : Bagus Kurniawan
NIM : 135020401111049
Tempat / Tanggal Lahir: Karaganyar, 13 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Suka damai, Plakat Tinggi
No HP : 082182228182
Email : bkkurniawan04@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2013 – 2017 : S1 Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang
2010 – 2013 : SMA Negeri 2 Sekayu
2007 – 2010 : SMP Negeri 2 Sekayu
2001 – 2007 : SDN Suka damai

Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan

2016 : Direktur Teknik Futsal Saweri Gading Futsal Saweri Gading
Lembaga Semi Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
2015 : Staff Medis EST (Economic Sport and Talent) Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Brawijaya
2014 : Asisten Kodiv Perlengkapan Ecolympic Ilmu Ekonomi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Asisten Kodiv Perlengkapan Pemilwa (Pemilihan Wakil
Mahasiswa) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Pengalaman Kerja

Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-P) di Kantor Perwakilan Wilayah Bank
Indonesia Kediri

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang telah memberikan cinta kasih, motivasi, dorongan, semangat dan doa dan juga adik- adik yang selalu memberikan tekanan kepada saya untuk segera menyelesaikan Skripsi.
2. Bapak Shofwan, SE., M.SI. atas waktu, masukan, saran, dan diskusi pemikiran selama penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
3. Semua saudara dan kerabat yang telah memberikan doa dan semangat baik dalam bentuk moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman Ekonomi Keuangan Perbankan 2013 semua yang telah membantu dalam proses perkuliahan hingga terselesaikan skripsi ini. Khususnya Youngky Bagus Prasetyo, Firnanda Adhi N, Bakhtiar totot AL, Cak Fariz Kurniawan S, Rizki Pellu Perdana, Ilham Haqiqi, Lukman, sebagai yang selalu menemani dan telah memberi saya semangat dalam penyusunan skripsi terutama dalam mengolah data.
5. Keluarga besar Futsal Saweri Gading FEBUB yang mengenalkan saya kepada Futsal dan juga membimbing saya menjadi insan yang baik dunia dan akhirat.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kata Pengantar

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan bagi mahasiswa program pendidikan Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Keuangan Perbankan. Penulis sadar bahwa laporan skripsi ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman terutama bagi mahasiswa dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang terjadi.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu saja penulis tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dwi Budi Santoso, SE., Msc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Putu Mahardika Adi Saputra, SE., M.Si., MA., Ph.D. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Shofwan, SE., M. SI. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Ibu Yenny Kornitasari, SE., ME. Karena telah membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi.
7. Bapak Prof. Agus Suman, SE., DEA selaku dosen penguji satu yang telah memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

8. Bapak Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D. selaku dosen penguji dua yang telah memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap dengan adanya penulisan ini dapat memberikan manfaat selain bagi penulis, tetapi juga bagi semua pihak.

Malang, 24 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II Tinjauan Pustaka.....	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.1.1 Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian.....	11
2.1.1.1 Pengeluaran Pemerintah	15
2.1.2 Teori Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Inflasi	16
2.1.3 Kebijakan Moneter dalam Perekonomian.....	20
2.1.3.1 Kerangka Operasional Kebijakan Moneter	21
2.1.3.2 Inflasi Sebagai Sasaran Kebijakan Moneter	22
2.1.4 Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Inflasi	24
2.1.5 Hubungan Tingkat Suku Bunga dengan Inflasi	25
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pikir	30
2.4 Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III Metode Penelitian.....	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	33
3.4 Definisi Operasional Variabel	34
3.4.1 Inflasi	34

3.4.2 Pengeluaran Pemerintah	34
3.4.3 Tingkat Suku Bunga	34
3.4.4 Jumlah Uang Beredar	35
3.5 Metode Analisis Data	35
3.5.1 Uji Akar Unit.....	38
3.5.2 Penentuan Lag Opimal	39
3.5.3 Uji Kointegrasi	39
3.5.4 Uji Kausalitas Granger	40
3.5.5 Vector Error Correction (VECM)	40
3.5.6 Analisis Impulse Response Function	41
3.5.7 Analisis Forecast Error Variance Decomposition	41
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	43
4.1 Gambaran Umum.....	43
4.1.1 Sejarah Kebijakan Moneter Di Indonesia	43
4.1.2 Sejarah Kebijakan Fiskal Di Indonesia.....	47
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Uji Stasioneritas.....	51
4.2.2 Penentuan Lag Optimum	53
4.2.3 Uji Kointgrasi Johansen	54
4.2.4 Uji Kausalitas Granger	55
4.2.5 Uji Vector Error Correction (VECM)	55
4.2.6 Impulse Response Function (IRF)	57
4.2.7 Variance Decomposition	60
4.3 Pembahasan	61
4.3.1 Matriks Hasil Penelitian.....	61
4.3.2 Hubungan Pengeluaan Pemerintah JUB, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi.....	61
BAB V Penutup	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target Inflasi dan Inflasi Aktual.....	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1	Uji ADF	52
Table 4.2	Penentuan Panjang Lag.....	53
Table 4.3	Hasil Uji Kointegrasi.....	54
Tabel 4.4	Hasil uji Kausalitas Granger.....	55
Tabel 4.5	Hasil Uji VECM.....	56
Tabel 4.6	Matriks Hasil Penelitian.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi.....	4
Gambar 1.2	Suku Bunga dan Tingkat Inflasi.....	6
Gambar 1.3	Jumlah uang beredar (JUB) dan Tingkat Inflasi	7
Gambar 2.1	Inflasi menurut Keynes.....	19
Gambar 2.2	Kerangka Operasional Kebijakan Moneter.....	22
Gambar 2.3	Kurva Inflasi.....	23
Gambar 2.4	Kerangka Pikir.....	30
Gambar 3.1	Langkah-langkah Analisis Time series dengan Model.....	37
Gambar 4.1	Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan PDB (%).....	45
Gambar 4.2	Tingkat Inflasi Sebelum dan Sesudah Krisis 1998.....	46
Gambar 4.3	Transmisi Kebijakan Moneter.....	47
Gambar 4.4	Anggaran Belanja Negara.....	50
Gambar 4.5	Hasil IRF (GOV to INF).....	58
Gambar 4.6	Hasil IRF (R to INF).....	59
Gambar 4.7	Hasil Uji IRF (JUB to INF).....	59
Gambar 4.8	Hasil Variance Decomposition.....	60

HUBUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER DENGAN INFLASI DI INDONESIA PERIODE 2005Q1 S/D 2015Q4

**Oleh :
BAGUS KURNIAWAN**

**Dosen Pembimbing :
Shofwan, SE. M.Si.**

ABSTRAK

Inflasi merupakan indikator stabilitas perekonomian, inflasi akan menjadi permasalahan dalam perekonomian jika tidak dikontrol, kebijakan yang digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi adalah Kebijakan Fiskal dan Moneter.

Penelitian ini menggunakan data pengeluaran pemerintah sebagai proxy dari Kebijakan Fiskal dan tingkat suku bunga dan JUB sebagai proxy dari Kebijakan Moneter. rentan waktu yang digunakan adalah 2005 s/d 2015. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Moneter dengan Inflasi di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Hasil empiris mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel inflasi periode sebelumnya dan JUB memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia dengan arah positif. sementara dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga dan JUB memiliki hubungan dengan inflasi di Indonesia.

Pegeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan arah negative sementara tingkat suku bunga dan JUB memiliki hubungan dengan arah yang positif.

Keyword: Kebijakan Fiskal, Moneter, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat suku bunga, Tingkat Inflasi, JUB, VECM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perekonomian yang ada di negara selalu mengalami suatu permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang selalu ada di dalam perekonomian suatu negara adalah masalah tingkat inflasi. Dimana tingkat inflasi selalu muncul baik ketika perekonomian suatu negara sedang mengalami pertumbuhan ataupun ketika perekonomian suatu negara sedang mengalami perlambatan. Begitu juga perekonomian di Indonesia, selalu terdapat permasalahan ekonomi yang selalu muncul seiring dengan berjalannya waktu, termasuk juga masalah tingkat inflasi.

Di Indonesia sendiri memiliki sejarah tingkat inflasi yang berbeda-beda dalam rentang waktu tertentu. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis hingga menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia mencapai 77,5%, selain itu pada tahun 2005 Indonesia mengalami inflasi sedang dengan tingkat inflasi sebesar 17,11%, selanjutnya pada tahun 2008 tingkat inflasi di Indonesia sebesar 11,06%. Tingkat inflasi yang cukup tinggi ini tentu menjadi dilema bagi perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketika tingkat inflasi yang tidak terkendali maka akan menimbulkan masalah lain dalam perekonomian.

Tingkat inflasi sendiri merupakan indikator stabilitas perekonomian, inflasi dianggap sebagai permasalahan ekonomi yang sangat penting, Hal inilah yang menyebabkan inflasi menjadi target utama yang harus dikendalikan oleh pemerintah. Inflasi sendiri merupakan suatu fenomena kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus (Boediono, 2014), tingkat inflasi yang stabil maka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai, sebaliknya jika

tingkat inflasi tidak bisa terkontrol maka inflasi akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, seperti ketidakstabilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingkat pengangguran meningkat.

Hal ini juga sama dengan menurut Langi *et al* (2014), dimana ketika tingkat inflasi tidak stabil maka akan terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi dalam jangka waktu atau periode tertentu. Ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan maka akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa yang dinilai terlalu tinggi, akibatnya barang dan jasa hasil produksi tidak habis terjual dan menyebabkan kerugian bagi produsen dan produsen tidak akan melakukan investasi tambahan. Sehingga tingkat investasi akan berkurang dan akan menyebabkan turunnya tingkat pendapatan nasional.

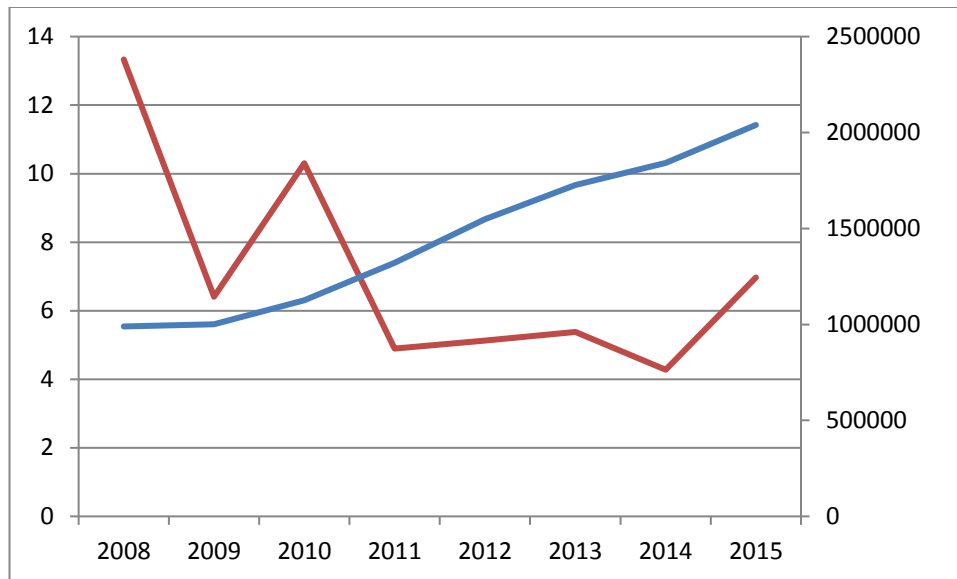
Sehingga diperlukan peran pemerintah dalam perekonomian ditujukan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam perekonomian suatu negara. Misalkan inflasi yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang terus meningkat dan juga defisit neraca pembayaran. Tingkat inflasi yang tidak terkontrol tentu akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tingkat inflasi yang ada. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, pemerintah Indonesia menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dimana pemerintah sebagai otoritas yang memegang kebijakan fiskal, sementara kebijakan moneter di pegang oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Dalam perspektif teoritis, kebijakan fiskal adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian, tindakan yang digunakan dalam mempengaruhi perekonomian adalah dengan

mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian. Kedua instrumen kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran sangat penting, karena kedua instrumen tersebut berkaitan erat dengan anggaran negara, (Prasetya, 2011). Dengan pengaturan anggaran negara, diharapkan kebijakan fiskal dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan terus tumbuh.

Kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam perekonomian, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah memiliki *multiplier effect* bagi perekonomian, pendapat ini dikemukakan oleh Keynes. (Surjaningsih *et al*, 2012). Sementara menurut Mankiw (2007), perekonomian dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran dengan tujuan pembangunan. Menurut Surasmono (2013), hal ini sudah terbukti dengan adanya peran pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi di negara maju, ketika sedang mengalami krisis diharapkan pemerintah memberikan stimulus fiskal yang dapat merangsang permintaan agregat melalui belanja negara dan investasi. Sementara di Indonesia peran kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah terhadap inflasi dapat dilihat dari grafik di bawah ini,

Gambar 1.1 :Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi



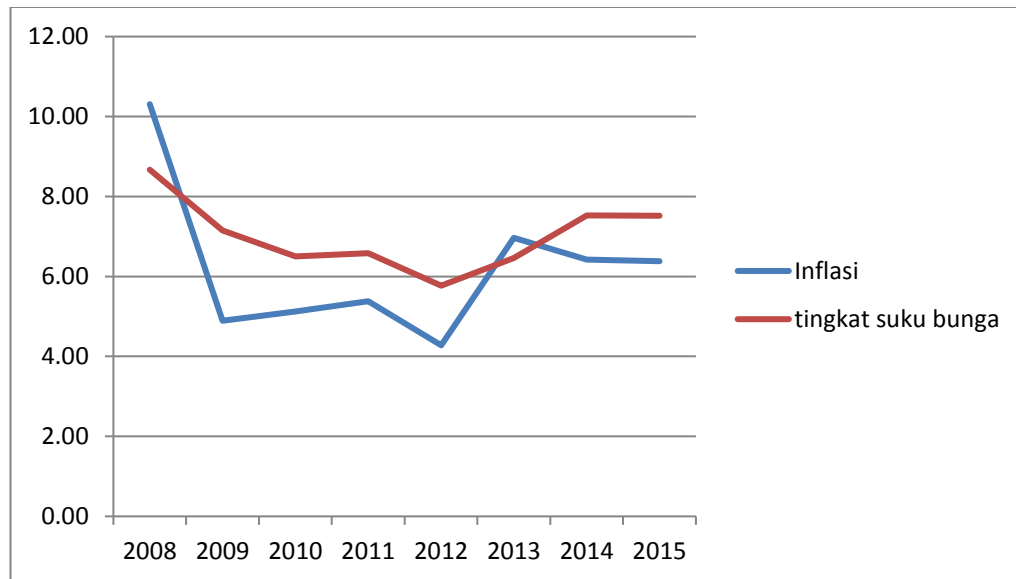
Sumber :Data diolah kemenkeu, 2017

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pengeluaran pemerintah Indonesia sejak 2008 s/d 2015 terus mengalami peningkatan sementara tingkat inflasi memiliki tren yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran Pemerintah Indonesia memiliki pengaruh terhadap inflasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Surjaningsih *et al* (2012), *shock* yang terjadi pada kebijakan fiskal dalam hal ini adalah pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif pada PDB, sementara pengeluaran pemerintah memiliki dampak *multiplier* terhadap investasi pemerintah seperti pembangunan infrastruktur yang secara tidak langsung juga akan menekan angka inflasi di Indonesia. Dimana ketika kualitas infrastruktur mengalami peningkatan, maka akan membuat arus perpindahan barang dan jasa antar daerah menjadi lebih mudah, sehingga dapat menekan laju inflasi yang terjadi.

Dalam menekan laju inflasi di Indonesia selain melalui kebijakan fiskal, juga melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam hal menjaga kestabilan nilai uang dan juga mengatur jumlah uang yang beredar di

masyarakat sehingga peredaran uang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kebijakan moneter memiliki target kebijakan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemeratan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan tingkat inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran, (Pohan, 2008). Inflasi adalah salah satu indikator perekonomian yang perlu diperhatikan. Dimana laju pertumbuhan inflasi sangat diupayakan agar selalu rendah dan stabil, hal ini dikarenakan ketidakstabilan inflasi akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan ekonomi (Langi *et al*, 2014). Krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia terjadi karena tidak stabilnya tingkat inflasi sehingga perekonomian tidak stabil. Bank Indonesia selaku otoritas moneter, menggunakan tingkat suku bunga dan pengaturan jumlah uang beredar (JUB) sebagai salah satu instrumen untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil.

Penggunaan tingkat suku bunga sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan moneter diharapkan mampu menekan laju inflasi yang terjadi di Indonesia. Dimana secara teori, jika tingkat suku bunga meningkat maka akan menyebabkan permintaan kredit akan berkurang dan secara tidak langsung mengurangi penyaluran uang dari perbankan ke masyarakat. Dengan berkurangnya penyaluran tersebut maka tingkat inflasi dapat ditekan. Di bawah ini digambarkan bagaimana hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat inflasi di Indonesia,

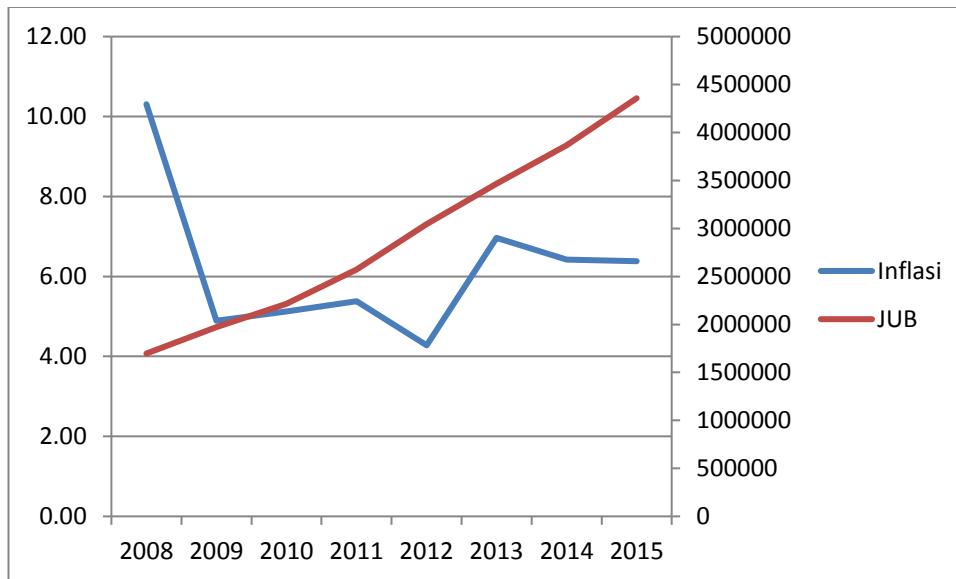
Gambar 1.2 :Suku Bunga dan Tingkat Inflasi

Sumber :Data diolah Bank Indonesia, 2017

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahawa tingkat suku bunga di Indonesia pada periode 2008 s/d 2015 sedikit berfluktuatif dan memiliki kecenderungan menurun. Sementara data inflasi pada gambar dibawah ini juga memiliki tingkat inflasi yang berfluktuatif. Secara teori tingkat suku bunga terhadap tingkat inflasi memiliki hubungan negatif, dimana ketika tingkat suku bunga rendah akan direspon peningkatan inflasi. begitu juga sebaliknya ketika tingkat suku bunga tinggi akan direspon dengan turunnya tingkat inflasi.

Selain tingkat suku bunga, instrumen kebijakan moneter yang digunakan adalah pengaturan jumlah uang beredar (JUB). Dengan menetapkan jumlah uang beredar diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat inflasi di Indonesia.dengan meningkatnya JUB diharapkan mampu mempengaruhi tingkat konsumsi di masyarakat. Tetapi disisi lain akan menyebabkan meningkatnya tingkat inflasi. Berikut ini data jumlah uang beredar di Indonesia.

Gambar 1.3 :Jumlah uang beredar (JUB) dan Tingkat Inflasi



Sumber :Data diolah kemendag dan Bank Indonesia, 2017

Dapat diketahui bahwa JUB memiliki hubungan positif dengan tingkat inflasi. Dimana ketika ada peningkatan uang beredar maka akan menyebabkan inflasi meningkat, begitu juga sebaliknya ketika jumlah uang beredar di masyarakat berkurang maka inflasi juga akan turun. Dari data diatas dapat diketahui ketika jumlah uang beredar semakin meningkat tetapi tingkat inflasi bergerak cenderung berfluktuatif. Hal ini tentu berbeda dengan teori yang ada, dimana dengan bertambahnya JUB maka akan menyebabkan tingkat inflasi meningkat juga.

Dalam mengatasi masalah inflasi di Indonesia, sering terjadi ketidak selarasan antara otoritas fiskal dan moneter. Bank Indonesia selaku otoritas moneter semata-mata hanya berfungsi menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, sedangkan dari sisi fiskal yang diwakili pemerintah berusaha untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan konsumsi dan investasi. Ketika terjadi kenaikan harga BBM, pemerintah tidak melakukan tindakan yang jelas, pemerintah lebih memilih memikirkan cara bagaimana untuk menghemat BBM, hal ini malah membuat kepanikan di masyarakat. Sementara

disisi moneter, Bank Indonesia mengambil kebijakan menaikkan tingkat suku bunga, pada kenyataannya inflasi yang terjadi adalah inflasi akibat kenaikan harga biaya produksi. Pertumbuhan ekonomi tidak optimal jika tidak sinkronnya otoritas fiskal dan moneter (Devia, 2012).

Berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Indrawati (2007). Hasil dari keselarasan antara fiskal dan moneter di Indonesia dapat dilihat pada tahun 2006, dimana pemerintah tetap menjaga kesinambungan fiskal dengan cara memberikan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari defisit anggaran yang dikendalikan pada tingkat 1,0 % dari PDB, terkendalnya defisit anggaran mampu memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,5% pada tahun 2006. Sementara dari sisi Moneter Indonesia, mampu menjaga kestabilan harga dengan cara menjaga tingkat inflasi pada level 6,60% (y-oy), hal ini lebih baik dari pada inflasi di awal tahun 2006 yang mencapai 17,03% (y-oy).

Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir dan Adamanti (2010), adanya kebijakan fiskal dan moneter ekspansif secara bersama-sama tidak memperburuk tingkat inflasi (-0,076%), sementara penelitian yang dilakukan oleh Langiet *al* (2014) mengatakan bahwa tingkat suku bunga dalam hal ini adalah BI Rates memiliki hubungan positif terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sedangkan jumlah uang beredar memiliki hubungan negatif dengan tingkat inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Namun jika dilihat dari data target inflasi yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya, ternyata tingkat inflasi yang terjadi selalu meleset dari target yang telah ditentukan, sementara menurut Surjaningsih (2012), dampak dari guncangan fiskal melalui pengeluaran pemerintah ternyata mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Namun jika

melihat fakta yang ada target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah selalu meleset dari inflasi aktual. Sehingga perlu diperjelas sebenarnya kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang lebih dominan dalam meminimalisir tingkat inflasi di Indonesia.

Tabel 1.1 :Target Inflasi dan Inflasi Aktual

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual
2005	6 \pm 1%	17.11
2006	8 \pm 1%	6.6
2007	6 \pm 1%	6.59
2008	5 \pm 1%	11.06
2009	4,5 \pm 1%	2.78
2010	5 \pm 1%	6.96
2011	5 \pm 1%	3.79
2012	4.5 \pm 1%	4.3
2013	4.5 \pm 1%	8.83
2014	4.5 \pm 1%	8.36

Sumber : Data diolah Bank Indonesia, 2017

Maka dari itu akan dilakukan penelitian kembali mengenai kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia dengan judul **“Hubungan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dengan Inflasi di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana hubungan pengeluaran pemerintah, BI Rates dan JUB terhadap tingkat inflasi di Indonesia ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hubungan antara pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga dan JUB terhadap tingkat inflasi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti, akademisi, instansi pemerintahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta pihak – pihak lain yang terkait, manfaat tersebut antara lain:

- a. Sebagai pedoman dalam mendalami masalah-masalah ekonomi terutama mengenai kebijakan fiskal dan moneter.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti permasalahan yang sama
- c. Sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan, khususnya bagi otoritas fiskal dan moneter, dan menjadi gambaran bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh pada perekonomian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian

Pemerintah sangat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu peran pemerintah adalah dalam hal mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, karena kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada penerimaan dan pengeluaran negara. Kegiatan dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara ini dilakukan dengan melihat kondisi perekonomian negara, (Alam, 2006). Untuk pengeluaran yang biasa dilakukan adalah pengeluaran rutin baik belanja pemerintah pusat maupun daerah (Devia, 2012). Sedangkan pendapatan yang diperoleh pemerintah bersumber dari pajak yang ditetapkan pemerintah, selain berperan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, peran pemerintah dalam perekonomian adalah melakukan pendistribusian pendapatan kepada masyarakat, (Case dan Fair, 2007). Dimana konsumsi masyarakat akan berubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada pajak dan transfer pemerintah,

$$\Delta C = c (\Delta Tr - \Delta Tx) \dots \dots \dots \text{pers 1}$$

Dimana ΔC adalah perubahan konsumsi, ΔTr adalah perubahan transfer dan ΔTx adalah perubahan pajak. Dimana ΔTx memiliki hubungan yang negatif terhadap ΔC , dan ΔTr memiliki hubungan positif dengan ΔC , (Soediyono, 1992). Pajak dalam makro ekonomi adalah wujud daya beli masyarakat berupa uang yang diberikan masyarakat kepada pemerintah tanpa balas jasa secara langsung yang diberikan pemerintah kepada

masyarakat, masyarakat akan memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah yang mana sumber dari pembangunan tersebut adalah dari pajak yang dibayarkan masyarakat, (Andriono, 2012).

Menurut Sukirno (2013), kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah dalam mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran dengan tujuan untuk mempengaruhi besarnya pengeluaran agregat dalam perekonomian, instrumen dari pendapatan adalah dari pajak. Menurut Keynes kebijakan fiskal sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran dan masalah inflasi. Ketika inflasi dirasakan sudah melewati ambang batas maka pemerintah dengan kebijakan fiskalnya melakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah, hal ini bertujuan agar uang dimasyarakat dapat terserap menjadi kas negara melalui pajak, sementara untuk mengurangi konsumsi masyarakat maka pemerintah akan mengurangi pengeluaran negara. Menurut Suheli (2012), kebijakan fiskal adalah kebijakan makroekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesempatan kerja yang tinggi, output yang tinggi dengan diiringi pertumbuhan ekonomi yang cepat, terjaganya stabilitas harga serta seimbangnya neraca perdagangan. Jika dibandingkan dengan kebijakan moneter, Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal sebagai alat atau kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal mampu menciptakan peningkatan permintaan agregat secara langsung.

Menurut Prasetyia, (2011) kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain adalah (1) meningkatkan kesempatan kerja, dimana pengeluaran pemerintah akan sangat berperan dalam mengatasi masalah ini, dimana ketika pengangguran tinggi maka pemerintah akan

meningkatkan pengeluaran pemerintah baik dalam konsumsi maupun investasi. (2) meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan, dimana pemerintah akan mengalokasikan pengeluaran dalam hal pembangunan agar setiap daerah memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. (3) meningkatkan laju investasi, dimana pemerintah akan mengalokasikan pengeluaran ke sektor jangka panjang seperti investasi pembangunan infrastruktur dan lain-lain. (4) meningkatkan stabilitas ekonomi, dimana pemerintah melakukan dan menetapkan kesinambungan fiskal dan perlu adanya kemandirian fiskal dengan tujuan agar setiap pengeluaran negara efektif dan efisien.

Tetapi jika pemerintah terlalu berlebihan dalam mendorong perekonomian akan menyebabkan kurang stabilnya perekonomian. Kurang stabilnya perekonomian akibat dorongan dari pemerintah yang berlebihan terjadi karena (1) Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperoleh dari utang sehingga akan menyebabkan defisit fiskal, hal ini akan diperparah jika dana yang dialokasikan pemerintah tidak tepat sasaran atau tidak produktif. (2) Salah satu cara menutupi defisit fiskal adalah dengan cara menerbitkan obligasi, semakin meningkatnya obligasi pemerintah akan menyebabkan *crowding-out effect*, yaitu penurunan investasi swasta yang produktif, hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan bahaya bagi pertumbuhan ekonomi. (3) hal terakhir adalah inflasi akan meningkat apabila terjadi defisit fiskal yang sudah diluar ambang batas, (Simorangkir, 2005).

Berdasarkan studi kasus yang ada, peran pemerintah melalui pembiayaan yang berlebihan dan terjadi secara terus menerus dengan menciptakan uang baru akan menyebabkan inflasi yang sangat tinggi atau

hyper inflation, (Simorangkir, 2005). Menurut Murni (2006), kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal aktif atau diskresioner dan kebijakan fiskal non diskresioner.

a. Kebijakan Fiskal Aktif

Kebijakan ini terjadi ketika pemerintah melakukan kebijakan dalam hal perubahan tingkat pajak atau komponen dalam pengeluaran pemerintah baik bersifat ekspansif maupun bersifat kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dengan cara mendorong dan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau dengan cara mengurangi tingkat pajak yang harus dibayarkan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah atau dengan cara menaikkan pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat dan juga bertujuan untuk mengatasi masalah inflasi yang terjadi.

b. Kebijakan Fiskal Nondiskresioner

Kebijakan fiskal nondiskresioner adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan defisit anggaran pemerintah ketika perekonomian dalam masa resesi atau krisis, dan melakukan menurunkan defisit anggaran ketika perekonomian dalam keadaan inflasi, Nanga dalam Andriono (2012).

2.1.1.1 Pengeluaran Pemerintah

Salah satu instrumen dari kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah. Dimana pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan nasional baik dalam pembelian barang dan jasa atau pembiayaan lainnya (Samuelson, 1997). Pengeluaran pemerintah juga dapat mengukur seberapa besar peran pemerintah dalam perekonomian, selain itu pengeluaran pemerintah juga menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat dan penentu pertumbuhan GNP riil jangka pendek (Suheli, 2012).

Ada beberapa teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang telah dikembangkan para ekonom. WW Rostow dan RA Musgrave berpendapat bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Ada perbedaan fokus alokasi sumber daya antara negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap lanjut yang kemudian tercermin dalam pengeluaran negara. Masing-masing tentunya berawal dari kebutuhan yang berbeda, sehingga arah kebijakannya juga berbeda. Ini tentunya berkaitan dengan seberapa lama negara itu telah merdeka dan kualitas sumber daya manusianya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui negara pada awal perkembangan ekonomi sebelum menuju tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga, ada beberapa hal yang sudah terpenuhi oleh negara pada tahap lanjut pembangunan, sehingga tidak perlu lagi terfokus pada penyediaan prasarana layaknya negara pada tahap awal perkembangan.

Jika melihat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian, menurut Muharman (2013), pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif pada inflasi. Dimana ketika negara melakukan

ekspansi fiskal dengan meningkatkan belanja negara maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan menciptakan permintaan pada masyarakat sehingga akan meningkatkan angka inflasi, hal ini sesuai dengan teori *demand pull inflation*.

Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa teori Keynes benar bahwa pengeluaran pemerintah sebagai komponen permintaan agregat akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam jangka pendek. Keynes berpendapat bahwa kegiatan ekonomi suatu negara ditentukan oleh kegiatan konsumsi atau pembelanjaan yang dilakukan oleh masyarakat yang terangkum dalam pengeluaran agregat, (Sukirno, 2013). Keynes berpendapat bahwa dalam kegiatan perekonomian dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah peran pembelanjaan negara dan komponen utama pembelanjaan negara. Dimana pengeluaran agregat dibagi kedalam empat bagian yaitu, konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor.

2.1.2 Teori Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Inflasi

Komponen kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ditetapkan dengan tujuan untuk membeli barang atau jasa yang digunakan untuk mencukupi setiap kebutuhan masyarakat. Dalam suatu perekonomian pengeluaran agregat yang dilakukan meliputi tiga jenis pengeluaran yaitu untuk konsumsi rumah tangga (C), investasi (I) dan pengeluaran untuk barang dan jasa (G) sehingga akan menciptakan keseimbangan ekonomi dengan persamaan tiga sektor, (Sadono, 2006) :

$$Y = C + I + G \dots \dots \dots \text{pers 2}$$

Dimana ketika terjadi penambahan pengeluaran pemerintah maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya perekonomian maka akan menyebabkan meningkatnya pendapatan dan akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi yang meningkat maka akan menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa sehingga akan menyebabkan inflasi (*demand pull inflation*).

Ada beberapa teori pendukung yang digunakan, beberapa tentang kebijakan fiskal menurut Mangkoesobroto (2001), yang terfokus pada komponen pengeluaran pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut ini,

a. Model Rostow dan Musgrave

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave ini dikenal dengan Model pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah. Model ini memiliki beberapa tahapan dalam menjelaskan hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan pembangunan ekonomi. Adapun tahapan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut ini, tahapan awal yaitu tahap dimana pemerintah melakukan investasi dalam jumlah besar untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Tahap menengah terjadi dimana pemerintah masih banyak berperan dalam perekonomian karena peran pemerintah sangat dibutuhkan agar ekonomi dapat memasuki fase atau tahap berikutnya, tetapi pada tahapan ini peran swasta sudah mulai terlihat sehingga hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan intervensi-intervensi untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Selanjutnya pada tahap lanjutan,

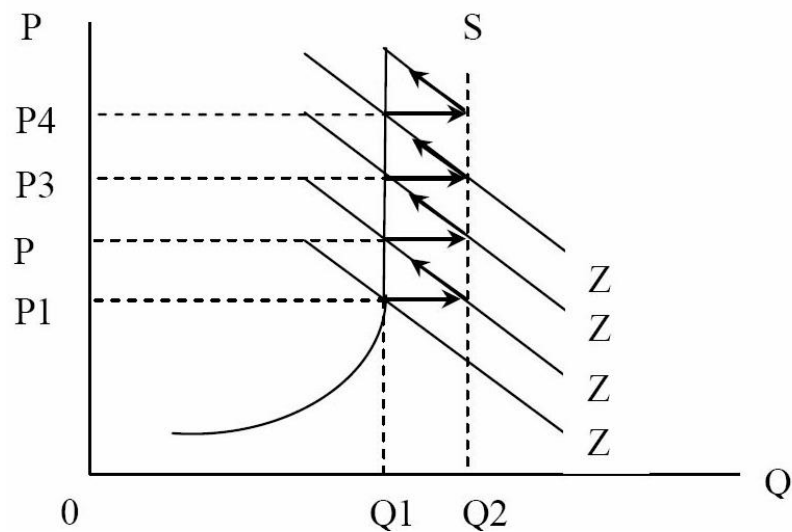
investasi pemerintah cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan investasi yang dilakukan pihak swasta. Peran pemerintah pada fase ini lebih kepada penyediaan prasarana pengeluaran social, (Ardianto, 2013).

b. Teori kuantitas

Teori ini menganggap bahwa inflasi hanya terjadi bila terjadi penambahan jumlah penawaran uang beredar. Inflasi tidak akan terjadi apabila jumlah penawaran uang tidak ditambah, pendapat selanjutnya adalah bahwa laju inflasi ditentukan oleh perilaku dan harapan masyarakat akan inflasi, jadi ketika jumlah uang beredar bertambah tetapi masyarakat belum membelanjakan uangnya sehingga tambahan uang hanya digunakan untuk mengisi kas masyarakat, tetapi ketika masyarakat sudah mulai menyadari adanya inflasi maka masyarakat akan membelanjakan uangnya kerna takut akan terjadi inflasi yang lebih tinggi dan masyarakat kehilangan manfaat untuk memegang uang, maka masyarakat akan membelanjakan uang yang dipegang, sehingga permintaan akan barang akan meningkat dan inflasi juga akan meningkat, (Boediono, 2014).

c. Teori Keynes

Teori ini berpendapat bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup lebih dari batas kemampuan ekonominya, sehingga permintaan di masyarakat akan lebih besar dari barang-barang yang tersedia. Setiap individu dalam ekonomi akan berusaha mendapatkan dana lebih guna membiayai permintaan yang ada. Jadi individu yang dapat hidup melewati kemampuan ekonominya adalah individu yang memperoleh dana tambahan. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, maka pemerintah akan mencetak uang baru.

Gambar 2.1 : Inflasi menurut Keynes

Sumber : Boediono, 1995

Dari kurva diatas dapat dapat diketahui bahwa inflasi terjadi karena adanya *inflationary gap*, ketika inflationary gap timbul (pemerintah mencetak uang baru), maka Z akan berubah dari Z_1 ke Z_2 dan inflationary Q_1Q_2 akan muncul dan harga akan mengalami kenaikan dari P_1 ke P_2 , (Boediono 2014). Menurut Saatcioglu dan Korap dalam Suheli (2012) yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan. Menurut mereka, peningkatan agregat moneter tidak diimbangi dengan peningkatan agregat riil yang menyebabkan peningkatan harga. Sedangkan menurut Holler dalam Suheli (2012), salah satu faktor yang dapat menyebabkan inflasi dinegara berkembang adalah kebijakan fiskal yang diterapkan di negara tersebut.

d. Teori Strukturalis

Teori ini berpendapat bahwa inflasi dikaitkan dengan struktural perekonomian suatu negara, teori ini menitik beratkan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara berkembang. Di dalam struktur perekonomian negara yang sedang berkembang terdapat 2 ketegaran

utama yaitu, ketidak elastisan dari penerimaan ekspor. Hal ini terjadi ketika pertumbuhan ekspor lebih lambat dari pertumbuhan sektor lain. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan negara untuk melakukan impor barang, sehingga akan menggunakan barang produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan masyarakat, dimana produk dalam negeri memiliki kualitas yang kalah dari barang impor sementara harga barang yang tinggi. Jika hal ini terjadi secara meluas maka akan terjadi inflasi. Ketegaran yang kedua adalah adanya ketidak elastisan dari produksi bahan makanan. Hal ini terjadi ketika pertumbuhan produksi bahan makanan lebih lambat dari pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita di negara yang sedang berkembang. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga bahan makanan di negara yang sedang berkembang, sementara para pekerja akan menuntut kenaikan gaji untuk mengimbangi kenaikan harga bahan makanan. Kenaikan gaji pekerja akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga meningkatkan harga jual barang. Hal ini akan terjadi secara berulang – ulang, (Boediono, 2014).

2.1.3 Kebijakan Moneter dalam Perekonomian

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui otoritas moneter dengan mengendalikan besaran moneter, adapun besaran moneter yang dikendalikan antara lain adalah jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dengan tujuan mencapai perkembangan ekonomi yang diinginkan. Kebijakan moneter adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh otoritas moneter yang berkenaan dengan jumlah uang beredar, (Mankiw, 2007).

Tujuan kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga agar harga tetap stabil dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, antara lain adalah

pertimbangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akan menciptakan inflasi (kurva Philips) sehingga dalam jangka panjang tidak berpengaruh pada sektor riil. Pertimbangan selanjutnya adalah setiap guncangan atau perubahan kebijakan ekonomi akan menimbulkan inflasi sehingga akan menimbulkan *time inconsistenc*. Pertimbangan yang ketiga adalah adanya retang waktu atau *time lag* dalam kebijakan moneter dalam mempengaruhi variabel ekonomi. Yang keempat adalah dengan tercapainya kestabilan harga maka akan menciptakan iklim ekonomi yang stabil juga karena dengan stabilnya harga maka akan mengurangi tingkat inflasi, (Simorangkir, 2005).

2.1.3.1 Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Dalam kebijakan moneter terdapat dua kerangka kebijakan moneter yaitu kerangka strategis dan kerangka operasional. Kerangka strategis berkaitan pada tujuan akhir dari kebijakan moneter yang ditetapkan seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita yang meningkat, berkurangnya pengangguran dan ekonomi yang stabil, (Warjiyo, 2004). Sementara untuk mencapai sasaran akhir dan sasaran antara diperlukan yang namanya instrumen kebijakan. Kerangka operasional Kebijakan moneter digunakan oleh otoritas moneter dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dari penentuan sampai dengan perkiraan sasaran akhir, Wijayanti (2011).

Gambar 2.2 : Kerangka Operasional Kebijakan Moneter



Sumber : Pohan, 2008

2.1.3.2 Inflasi Sebagai Sasaran Kebijakan Moneter (*Inflation Targeting*)

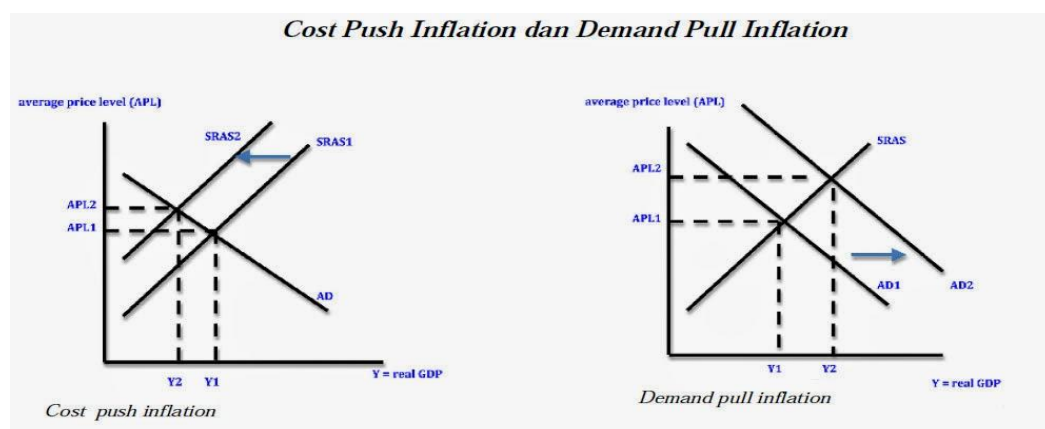
Indonesia sudah lama menetapkan kebijakan *inflation targeting*, tepatnya pada tahun 2000 sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 dimana Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan pencapaian kestabilan nilai rupiah, terutama dalam bentuk inflasi dan menetapkan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter.

Ada beberapa ciri pokok dari kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran akhir atau *inflation targeting framework* (ITF) (Pohan, 2008), pertama inflasi adalah sasaran utama dari kebijakan moneter, sehingga inflasi dijadikan prioritas utama dan sebagai acuan dalam mencapai sasaran akhir kebijakan moneter. Kedua, kebijakan moneter harus bersifat *forward looking*, dimana di dalam kebijakan moneter terdapat lag atau jangka waktu sehingga perlu memperhatikan sasaran inflasi ke depan. Ketiga, respon kebijakan moneter, dimana otoritas moneter harus bersiap mengambil kebijakan jika terjadi perubahan yang terjadi pada perekonomian. Keempat adalah tata kelola atau *good governance*, jadi harus ada kejelasan tujuan transparansi dan akuntabilitas. Inflasi adalah fenomena moneter yang biasa dijumpai hampir di setiap perekonomian negara dan menjadi hal yang sangat penting dalam

perekonomian. Inflasi sendiri adalah kecenderungan kenaikan harga secara terus menerus, (Boediono, 2014). Inflasi yang tinggi dan tidak terkendalikan dapat mengganggu perekonomian karena dapat menyebabkan tingkat suku bunga riil akan turun, dengan turunnya suku bunga riil maka akan menyebabkan adanya aliran dana keluar karena tingkat suku bunga riil dalam negeri lebih rendah dari pada luar negeri, (Pohan, 2008).

Inflasi sendiri secara umum dapat timbul karena dua hal yaitu, inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang meningkat dapat disebut sebagai *demand inflation* dan inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi barang dan jasa sehingga menyebabkan kenaikan harga barang dapat disebut *cost inflation* (Boediono 2014).

Gambar 2.3 : Kurva Inflasi



Sumber : Boediono, 1982

Sementara ada beberapa jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan inflasi,

- Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
- Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun)
- Inflasi berat (antara 30%-100% setahun)
- Hiperinflasi (diatas 100% setahun)

2.1.4 Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Inflasi

Dalam hal untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter, yaitu inflasi, bank Indonesia sebagai otoritas moneter menggunakan jumlah uang beredar sebagai indikator untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. hal ini dilakukan karena pertumbuhan jumlah uang beredar jika tidak dikendalikan akan menyebabkan inflasi, karena ketika masyarakat memegang uang lebih maka akan ada kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Selain itu permintaan dan penawaran akan uang juga akan mempengaruhi kondisi pasar uang, dan pasar uang sendiri akan berpengaruh terhadap sektor riil, (Pohan 2008).

Beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara JUB dengan tingkat inflasi, salah satunya adalah teori kuantitas uang klasik yang diperkenalkan oleh Irving Fisher. Irving Fisher dalam Boediono (2014) berpendapat bahwa

“Permintaan uang di dalam suatu masyarakat merupakan proporsi tertentu dari volume transaksi, dan volume transaksi merupakan suatu proporsi konstan dari pendapatan nasional. Jadi permintaan akan uang akan dipengaruhi oleh pendapatan nasional saja, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat bunga. Selain itu tingkat pendapatan nasional yang equilibrium tidak bisa dipengaruhi kebijakan fiskal”.

Dalam teori yang dikemukakan Irving Fisher dikenal dengan persamaan sebagai berikut ini,

$$MV_T = PT \dots\dots\dots \text{pers 3}$$

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan melalui sektor keuangan yang semakin pesat perkembangannya. Namun seiring perkembangan tersebut, muncul

masalah yaitu terjadi hubungan antara jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi yang cenderung kurang stabil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa krisis yang sudah terjadi akibat dari kurang stabilnya inflasi, (Langi *et al*, 2014).

Menurut Mishkin (2008), jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif terhadap inflasi. dimana ketika terjadi penambahan pada jumlah uang yang beredar maka akan mendorong kenaikan tingkat harga melebihi tingkat harga yang diharapkan, sehingga akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi. Sementara menurut Dornbusch dan Fischer (1997) dalam Langi *et al* (2014), laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi secara berkelanjutan akan menghasilkan laju inflasi yang tinggi dan laju pertumbuhan uang beredar yang rendah pada gilirannya akan mengakibatkan laju inflasi rendah. Selanjutnya pernyataan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter mengandung arti bahwa laju inflasi yang tinggi tidak akan berlangsung terus apabila tidak disertai dengan laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi.

2.1.5 Hubungan Tingkat Suku Bunga dengan Tingkat Inflasi

Indonesia sudah menetapkan kebijakan pengendalian suku bunga sebagai indikator kebijakan moneter sejak tahun 2005 bersamaan dengan inflasi sebagai sasaran tunggal kebijakan moneter. Hal ini dilakukan karena semakin berkembangnya penggunaan uang yang bukan hanya untuk alat transaksi saja. Pengendalian suku bunga ini diharapkan dapat mempengaruhi stabilitas harga atau inflasi, (Pohan 2008).

Proses pelaksanaan kebijakan pengendalian tingkat suku bunga ini diawali dengan penetapan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter. Akan tetapi penetapan sasaran akhir kebijakan moneter disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ada. Sehingga perlu adanya pemantauan akan perkembangan inflasi, ketika inflasi dirasakan meningkat maka otoritas moneter

akan meningkatkan suku bunga dan begitu juga sebaliknya jika inflasi terlalu rendah maka otoritas moneter akan menurunkan suku bunga. Menurut Karl dan Fair (2007), suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman yang telah dilakukan. Sementara menurut Sunariyah (2006), adalah harga dari pinjaman, dimana bunga adalah suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Sedangkan fungsi dari suku bunga adalah sebagai berikut ini,

- a. Sebagai daya tarik bagi pemilik dana lebih agar diinvestasikan atau ditempatkan ke lembaga keuangan
- b. Suku bunga digunakan sebagai alat/instrumen moneter dalam mengedalikan penawaran dan permintaan uang di dalam perekonomian suatu negara.
- c. Selanjutnya tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai pengatur atau sebagai alat untuk mengontrol jumlah uang yang beredar.

Perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi (Bank Indonesia, 2013).

Sementara hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat inflasi memiliki hubungan yang negatif dimana ketika inflasi meningkat maka otoritas moneter akan melakukan kebijakan dengan meningkatkan tingkat suku bunga dengan tujuan agar tingkat inflasi kembali stabil. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya tingkat suku bunga maka akan diikuti dengan peningkatan tingkat suku bunga kredit dan deposito, sehingga masyarakat akan cenderung untuk mengurangi memegang uang dan memilih menempatkan uangnya ke lembaga keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan teori *Cambridge* dimana Teori ini berpendapat bahwa, perilaku masyarakat memegang kekayaan dalam bentuk uang karena uang bersifat *liquid* sehingga mudah ditukarkan ke dalam bentuk kekayaan lain. Tetapi disini lain, jika memegang kekayaan dalam bentuk uang akan mengorbankan peluang untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk pendapatan bunga jika memegang kekayaan dalam bentuk surat berharga. Teori ini menekankan pada perilaku masyarakat akan untung-rugi dalam memegang uang. Dari teori inilah diketahui bahwa tingkat suku bunga memiliki hubungan dengan tingkat inflasi, ketika inflasi dirasa terlalu tinggi maka tingkat suku bunga dinaikkan, sehingga memberikan pertimbangan bagi pemegang uang untuk menempatkan dananya di bank karena memiliki pengembalian yang tinggi. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang dimiliki menyebabkan masyarakat menempatkan dananya di bank, dengan tingkat peredaran uang di masyarakat akan dapat dikurangi dan akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi yang terjadi, (Boediono, 2014).

Sebaliknya ketika inflasi dirasakan terlalu rendah, maka otoritas moneter menetapkan kebijakan dengan meningkatkan tingkat suku bunga dengan tujuan agar penyaluran kredit lebih meningkat dan tingkat investasi yang meningkat dan kemudian dibarengi dengan perekonomian dapat kembali

meningkat. Tetapi jika terlalu rendah tingkat suku bunga yang ditetapkan maka akan menyebabkan peredaran uang di masyarakat yang terlalu besar sehingga menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang meningkat dan tingkat konsumsi yang juga meningkat. Hal ini akan menyebabkan tingkan inflasi meningkat karena permintaan akan barang dan jasa yang meningkat, inflasi ini lebih sring disebut dengan *demand pull inflation*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

Dimana penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini,

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama	Variabel	Metode	Hasil
1	Fiscal and Monetary policies in The BRICS (Jawadi et al)	Tingkat suku bunga, Tingkat suku bunga FED, GDP, Pengeluaran pemerintah, M2	Panel Var	Perubahan tingkat suku bunga menyebabkan kontraksi pada sektor riil, tingkat inflasi dan likuiditas. Pengeluaran pemerintah menyebabkan output meningkat, tingkat harga menjadi lebih rendah.
2	Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di	Pengeluaran pemerintah,	Game Theory	koordinasi antara kebijakan fiskal dan

No	Judul dan Nama	Variabel	Metode	Hasil
	Indonesia : Kajian dengan Pendekatan Game Teori, (Simorangkir)	suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi		moneter di Indonesia sudah berjalan dengan baik.
3	Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia, (Indrawati)	Suku bunga, pengeluaran pemerintah, inflasi, GDP	VAR	Goncangan fiskal mempengaruhi inflasi, goncangan moneter menurunkan output.
4	Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal Terhadap PDB dan Inflasi Di Indonesia, (Muharman)	Pengeluaran pemerintah, pajak, PDB dan inflasi	ECM	Belanja negara memiliki hubungan dengan PDB dalam jangka panjang, belanja negara juga memiliki hubungan dengan inflasi dalam jangka pendek dan panjang. Sementara pajak memiliki hubungan dalam jangka panjang dengan PDB
5	Kebijakan Fiskal dan Moneter Di Indonesia : Perbandingan	PDB, suku bunga, pengeluaran	OLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter

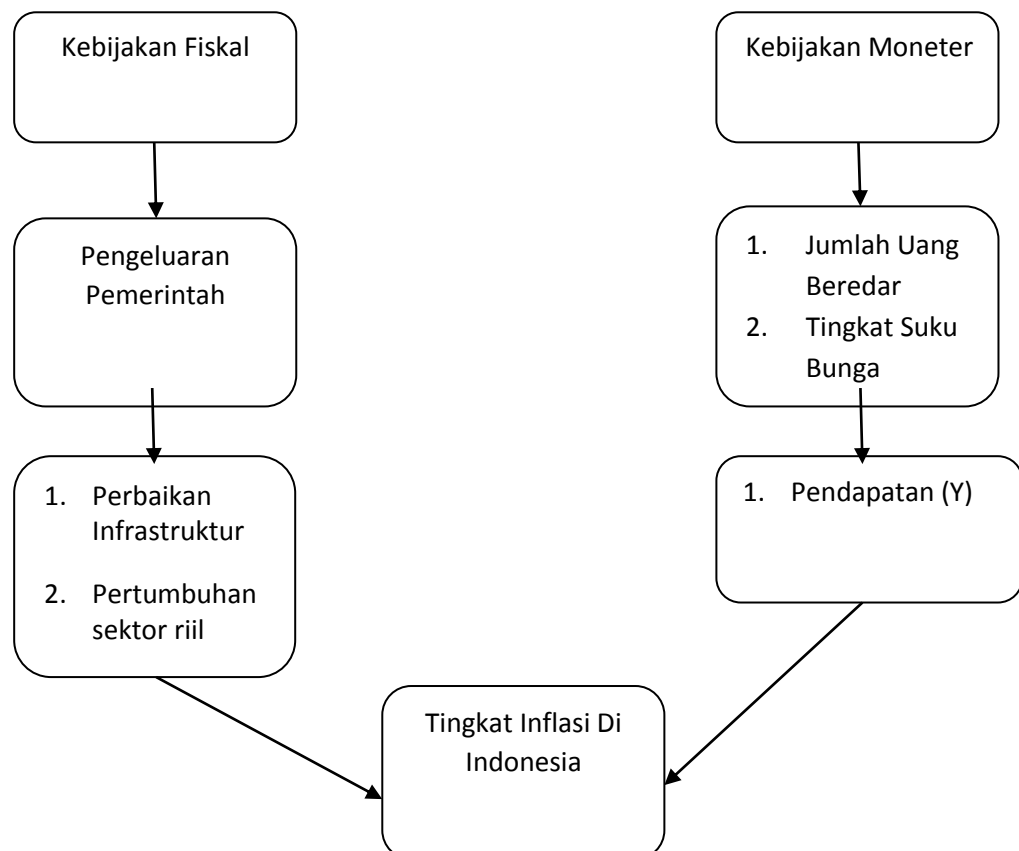
No	Judul dan Nama	Variabel	Metode	Hasil
	Efektivitas, (Wardhana)	pemerintah, nilai tukar, pendapatan US		lebih efektif mempengaruhi pendapatan nasional jika dibandingkan dengan kebijakan fiskal

Sumber : Berbagai sumber, 2017

2.3 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini,

Gambar 2.4 : Kerangka Pikir



Sumber : Penulis, 2017

Dari kerangka penelitian gambar 2.5 dapat dijelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian. Secara umum kebijakan fiskal lebih cenderung untuk meningkatkan sektor riil seperti total pengeluaran masyarakat jumlah produksi masyarakat. Kebijakan fiskal di Indonesia memiliki instrumen yaitu pengeluaran pemerintah. Dimana pengeluaran pemerintah dilakukan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti halnya yang diungkapkan Rostow. Selain itu juga pengeluaran pemerintah yang dialokasikan ke sektor riil dapat menciptakan pertumbuhan pada sektor riil sehingga dengan tumbuhnya sektor riil maka inflasi dapat ditekan, karena tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan. Selain itu peran pengeluaran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang perekonomian juga dapat menekan tingkat inflasi seperti pembangunan infrastruktur. Namun jika pemerintah terlalu besar melakukan ekspansi dalam hal ini adalah melakukan pengeluaran secara besar maka akan menyebabkan terjadinya inflasi. sehingga pemerintah harus menetapkan pengeluaran dengan tepat agar pertumbuhan ekonomi yang diciptakan tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat inflasi.

Selanjutnya dari sisi kebijakan moneter, kebijakan moneter adalah kegiatan atau proses yang dilakukan oleh otoritas moneter dalam mengendalikan dan menjaga tingkat peredaran uang guna untuk mendorong stabilitas perekonomian dan juga pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah inflasi. setiap kebijakan moneter yang ditetapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Jika pemerintah melakukan ekspansi terhadap instrumen jumlah uang beredar maka akan meningkatkan uang di masyarakat dan meningkatkan pendapatan

masyarakat, tetapi hal ini akan diikuti dengan meningkatnya inflasi karena tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya jika pemerintah menetapkan suku bunga yang rendah dengan tujuan agar masyarakat mampu meminjam uang (kredit) sehingga tingkat konsumsi dan investasi akan meningkat, dengan meningkatnya konsumsi dan investasi maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat, tetapi jika dibiarkan terus rendah maka akan menyebabkan inflasi.

2.4 Hipotesis Penelitian

H_{01} : Pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan terhadap tingkat inflasi di Indonesia

H_{11} : Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan terhadap tingkat inflasi di Indonesia

H_{02} : Diduga tingkat suku bunga tidak memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia

H_{12} : Diduga tingkat suku bunga memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia

H_{03} : Diduga Jumlah uang beredar (JUB) tidak memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia

H_{13} : Diduga Jumlah uang beredar (JUB) memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian ini disusun secara sistematis antara bagian-bagian, fenomena, dan hubungan yang terdapat dalam objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan menggunakan model matematis dengan teori, penelitian terdahulu serta adanya hipotesis yang berkaitan dengan suatu kejadian. Dimana data yang digunakan merupakan angka dan analisisnya menggunakan statistik. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai hubungan kebijakan fiskal dan moneter terhadap inflasi di Indonesia.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ada di Indonesia. Pemilihan tempat penelitian dengan alasan ketersediaan data serta Negara Indonesia merupakan negara dengan kondisi perekonomian yang sedang berkembang, sehingga masih sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kurun waktu 2005 s/d 2015.

3.3 Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bisa diperoleh dari bi.go.id, dan bps.go.id. Data yang digunakan adalah data kurun waktu atau *time series*, yaitu data 2005Q1 s/d 2015Q4. Data yang digunakan meliputi data

- a. Data inflasi Indonesia dari tahun 2005 s/d 2015
- b. Data Pengeluaran pemerintah Indonesia dari tahun 2005 s/d 2015
- c. Data Jumlah uang beredar di Indonesia dari tahun 2005 s/d 2015
- d. Data Tingkat suku bunga di Indonesia dari tahun 2005 s/d 2015

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah batasan yang digunakan dalam menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar penyusunan skripsi ini dapat menjelaskan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

3.4.1 Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus secara umum. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Nopirin (2000) bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga akan barang dan jasa secara terus menerus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi. Data diperoleh dari mengakses data yang tersedia di bps.go.id.

3.4.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah adalah nilai riil jumlah total realisasi pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran, yang termasuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sesuai dengan APBN, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengeluaran pemerintah secara total. Data pengeluaran pemerintah Indonesia diperoleh dari mengakses data yang tersedia di Bank Indonesia.

3.4.3 Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai sinyal kebijakan moneter. Data tingkat suku bunga dapat diakses di web site Bank Indonesia.

3.4.4 Jumlah Uang Beredar (JUB)

Jumlah uang beredar adalah M1 yang terdiri atas uang kartal dan uang giral dan M2 yang terdiri atas M1 ditambah dengan uang kuasi. Data jumlah uang beredar yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah uang beredar dalam arti luas (M2). Data jumlah uang beredar dalam arti luas dapat diakses di web site Kementrian Perdagangan.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah menggunakan *Vector Auto Regression* (VAR) atau *Vector Error Correction Model* (VECM). Secara sederhana, VAR menggambarkan hubungan yang “saling menyebabkan” (kausalitis) antarvariabel dalam sistem, dengan menambahkan *intercept*. metode ini mulai dikembangkan oleh Sims pada tahun 1980. Di dalam model VAR/VECM terdapat IRF dan VD yang dapat digunakan sebagai peramalan dan proyeksi atas hubungan yang terjadi di antara masing-masing variabel. Selain itu juga dilakukan uji kausalitas Granger untuk mengetahui hubungan timbal balik atau adanya hubungan dua arah antar variabel yang diteliti. Secara spesifik, VAR digunakan untuk melakukan uji kausalitas antara variabel output dengan variabel sistem keuangan dan untuk melihat hubungan jangka panjangnya. Sementara VECM digunakan untuk melihat intensitas dan *speed of adjustment* atau respon dari masing-masing variabel

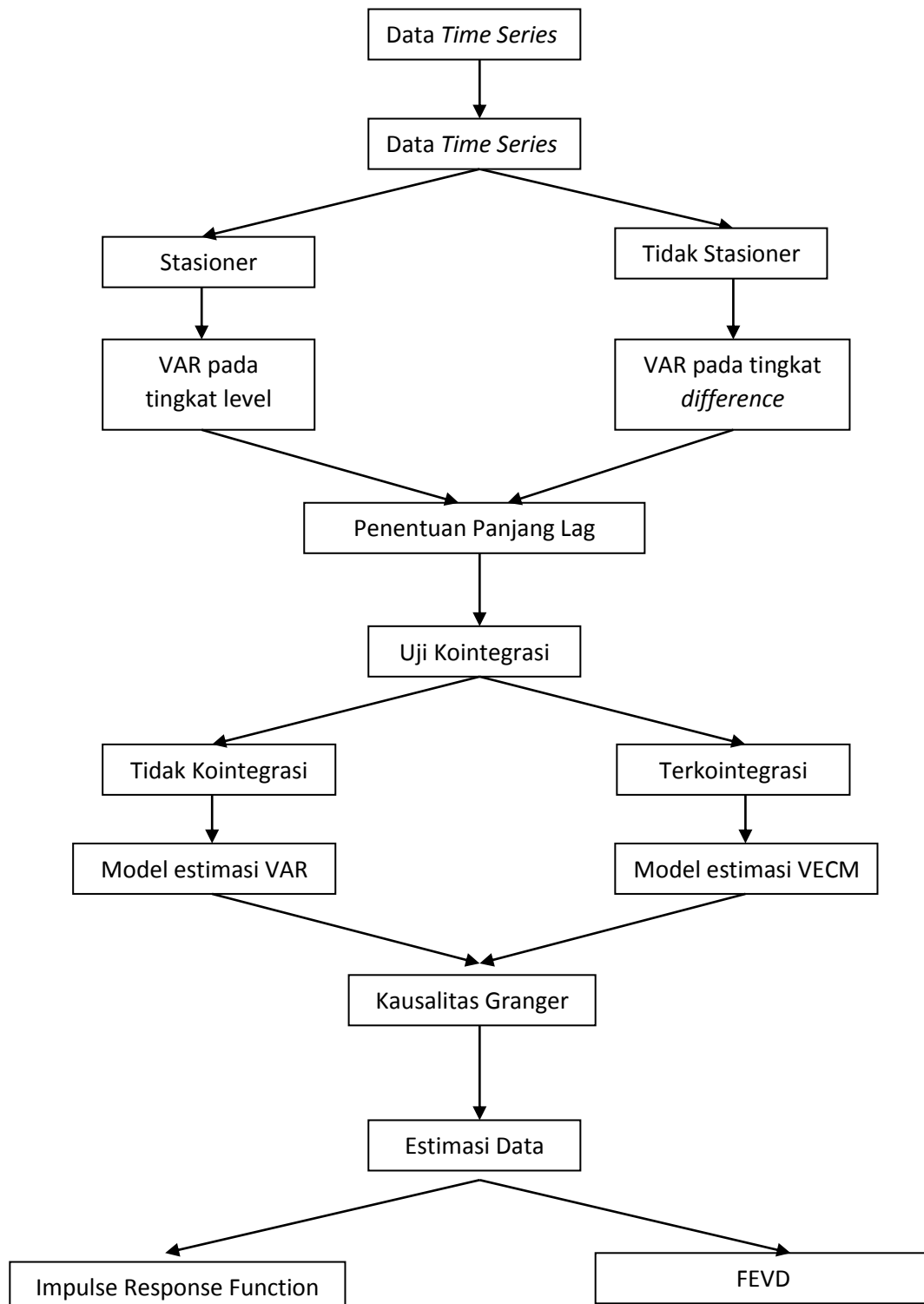
Penelitian ini menggunakan model VAR apabila data yang digunakan dalam penelitian stasioner dan tidak terjadi kointegrasi. Maka dilakukan uji stasioner data terlebih dahulu, VAR bisa digunakan apabila seluruh data stasioner di tingkat level atau lebih dikenal dengan istilah *Unrestricted VAR*. Jika data tidak stasioner di tingkat level, maka dilakukan diferensiasi untuk

mengetahui tingkat stasioner tiap data. Setelah itu dilakukan uji kointegrasi untuk mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang atau tidak. Jika data yang digunakan stasioner pada saat deferensiasi tetapi tidak terdapat kointegrasi maka model yang digunakan adalah model VAR dengan data deferensiasi (VAR *in different*) tetapi jika data stasioner pada deferensiasi dan terdapat kointegrasi maka model yang digunakan adalah VECM. VECM adalah salah satu bentuk dari VAR yang terektriksi karena adanya hubungan jangka panjang antar variabel agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasi namun tetap membiarkan perubahan dinamis dalam jangka pendek. Untuk model VAR sendiri adalah sebagai berikut ini,

$$IN Ft = \beta_0 + \beta_1 IN Ft - 1 + \beta_2 GOV t - i + \beta_3 RT t - i + \beta_4 JUB t - i + e_t$$

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan pengujian menggunakan model VAR/VECM adalah sebagai berikut ini,

Gambar 3.1 : Langkah-langkah Analisis Time series dengan Model VAR/VECM



Sumber : Suheli, 2012

3.5.1 Uji Akar Unit

Menurut Gujarati (2003), stasionetas suatu data dalam penelitian sangat lah peting, terutama dalam penggunaan data dalam bentuk *time series*. Suatu variabel dapat dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata dan variansnya konstan sepanjang waktu dan nilai kovariannya antara dua periode waktu hanya tergantung pada selisih atau selang antara dua periode waktu tersebut bukan waktu sebenarnya ketika kovarian tersebut dihitung. Hal ini sangat penting karena stasioneritas suatu data akan mempengaruhi hasil estimasi regresi. Dimana regresi data yang tidak stasioner akan menyebabkan hasil regresi palsu, dimana memiliki R^2 yang tinggi dan signifikansi t statistic yang tinggi juga tetapi tidak sesuai atau tidak berarti secara teori.

Pengujian stasioneritas data dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Akar Unit (*unit Root Test*), uji ini diperkenalkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller. Dalam Uji Deckey Fuller ini menggunakan asumsi adanya error yang homogeny dan independen. Dalam Uji ADF ini lag harus ditentukan terlebih dahulu. Adapun cara untuk menentukan apakah data tersebut stasioner atau tidak, bisa dilihat dari perbandingan antara nilai statistic ADF dengan nilai kritis distribusi statistik MacKinnon. Jika nilai statistik ADF lebih besar dari nilai kritis distribusi statistik Mackinnon maka H_0 ditolak, dalam artian bahwa data yang digunakan telah stasioner. Begitu juga sebaliknya jika nilai statistik ADF lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistic MacKinnon maka data yang di uji tidak stasioner.

Apabila pengujian yang dilakukan ditingkat level tidak stasioner maka pengujian selanjutnya dilakukan di tingkat *first different*. Tetapi bila data yang diuji di tingkat *first different* tidak stasioner maka akan dilakukan pengujian di tingkat turunan kedua yaitu *second different*, apabila data telah stasioner maka

akan dilanjutkan ke langkah berikutnya yaitu penentuan lag maksimum. Menurut Gujarati (2004), estimasi untuk ADF test dilakukan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 + \delta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^m \Delta Y_{t-i} + \mu_t$$

dimana

ΔY_t = bentuk *first difference*,

β_1 = intersep,

m = panjang lag

μ = error term

3.5.2 Penentuan Lag Optimal

Tujuan dari model VAR adalah untuk melihat perilaku dan hubungan setiap variabel dalam sistem, maka dari itu penentuan lag optimal sangat penting dalam model VAR/VECM. Menurut Gujarati (2003), penentuan lag optimal dapat dilakukan dengan menggunakan criteria informasi *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwartz Information Criterion (SIC)*, atau dengan *Hannan-Quinn Information Criterion (HQ)*. penentuan lag diperoleh dengan cara memilih kriteria yang mempunyai nilai paling kecil diantara berbagai lag yang diajukan.

3.5.3 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak ada keseimbangan jangka panjang antar variabel dalam model. Jadi jika pengujian menghasilkan kointegrasi antar variabel maka ada hubungan dalam jangka panjang dalam model tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada kointegrasi antar variabel, antara lain dengan cara Uji Kointegrasi Engle Granger, Uji *Cointegrating Regression Durbin Watson (CDRW)*, dan Uji *Johansen*.

3.5.4 Uji Kausalitas Granger

Tahapan selanjutnya dalam model VAR/VECM setelah menentukan panjang lag optimal adalah melakukan uji kausalitas Granger guna mengetahui apakah terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel endogen sehingga spesifikasi model VAR/VECM menjadi tepat untuk digunakan mengingat sifatnya yang non struktural. Menurut Granger (1969) dan Gujarati (2003), uji kausalitas Granger melihat pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang sehingga uji ini memang tepat dipergunakan untuk data *time series*.

Dalam penelitian ini, uji kausalitas ini digunakan untuk melihat hubungan antara pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga dan JUB dengan tingkat inflasi di Indonesia. dimana secara teori diketahui bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih dominan disektor riil dan tingkat suku bunga dan JUB yang lebih dominan dalam sektor keuangan memiliki hubungan dengan tingkat inflasi, karena merupakan indikator dalam kestabilan perekonomian. Dimana inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara luas dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu atau bisa juga disebut bahwa inflasi adalah terjadinya penurunan nilai mata uang terhadap suatu barang dan jasa.

3.5.5 Vector Error Correction (VECM)

Jika kointegrasi antar variable terbukti ada serta hubungan antar variable telah ditentukan melalui pengujian kausalitas Granger, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan prosedur *Vector Error Correction* untuk mengetahui hubungan dinamis model tersebut dalam jangka panjang. Adapun spesifikasi model penelitian ini sebagai berikut :

$$\Delta INF_t = \beta_0 + \beta_1 ut_{-1} + \sum_{i=1} \beta_i \Delta INF_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_i \Delta GOV_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_i \Delta R_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_i \Delta JUB_{t-i} + e_t$$

Dimana u_{t-1} menunjukkan *error correction term* yang merupakan residual *lag* dari hubungan kointegrasi yang terjadi. *Error correction term* dapat menangkap kecepatan penyesuaian jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Oleh karena itu *error correction term* disebut juga *speed of adjustment*.

3.5.6 Analisis Impulse Response Function (IRF)

Merupakan salah satu metode pada VAR/VECM yang digunakan untuk melihat respon variabel endogen terhadap pengaruh inovasi variabel endogen lain yang ada dalam model. Analisis IRF mampu melacak respon dari variabel endogen dalam model VAR/VECM akibat adanya suatu shock atau perubahan di dalam variabel gangguan (e), yang selanjutnya dapat melihat lamanya pengaruh dari shock suatu variabel terhadap variabel lain hingga pengaruhnya hilang dan kembali konvergen. Adanya shock variabel gangguan (e_{1t}) pada persamaan variabel endogen ke-1 dalam model VAR, misalnya e_{1t} mengalami kenaikan sebesar satu standar deviasi, maka akan mempengaruhi variabel endogen ke-1 itu sendiri untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Mengingat variabel endogen tersebut juga muncul dalam persamaan variabel endogen yang lain, maka shock variabel gangguan e_{1t} tersebut juga akan menjalar ke variabel endogen lainnya melalui struktur dinamis VAR/VECM. Dengan demikian, shock atas suatu variabel dengan adanya informasi baru akan mempengaruhi variabel itu sendiri dan variabel lainnya dalam model.

3.5.6 Analisis Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

Analisis Variance Decomposition (VD) atau dikenal sebagai *forecast error variance decomposition* merupakan alat analisis pada model VAR/VECM yang akan memberikan informasi mengenai proporsi dari pergerakan pengaruh shock pada satu variabel terhadap variabel lainnya pada saat ini dan periode ke

depannya. VD menggambarkan relatif pentingnya setiap variabel dalam model VAR/VECM karena adanya shock atau seberapa kuat komposisi dari peranan variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Berbeda dengan IRF, VD berguna untuk memprediksi kontribusi persentase varian setiap variabel karena adanya perubahan variabel tertentu, sedangkan IRF digunakan untuk melacak dampak shock dari satu variabel endogen terhadap variabel lainnya dalam model VAR.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Kebijakan Moneter Di Indonesia

Setelah berdirinya Bank Indonesia, setiap kebijakan moneter di Indonesia ditetapkan oleh Dewan Moneter dengan pertanggung jawaban dari pemerintah. Sejak Indonesia merdeka dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1950, Indonesia langsung dihadapkan pada kondisi perekonomian yang tidak menentu, hal ini akibat dari perang yang terjadi dan terjadinya kemerosotan ekspor sehingga menyebabkan jatuhnya nilai tukar mata uang dan pada akhirnya menyebabkan meningkatnya tingkat inflasi di Indonesia. Di periode yang sama, perbankan di Indonesia telah mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan juga tabungan. Selain itu dana masyarakat juga bergerak dalam bentuk transaksi saham atau obligasi di pasar modal. Pada periode 1953-1959, dana masyarakat yang dikelola perbankan menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan juga ketersediaan perbankan yang mudah dijangkau masyarakat. Namun diantara periode tersebut, kondisi perekonomian Indonesia tetap tidak stabil, hal ini dikarenakan laju inflasi yang terus meningkat (bi.go.id).

Hal itulah yang menyebabkan pemerintah melakukan kebijakan pengetatan moneter pada tahun 1959 dengan tujuan agar tingkat inflasi dapat diatasi. Pengetatan moneter dilakukan dengan cara adanya peraturan tentang ketentuan pagu kredit bagi tiap-tiap bank secara individual. Selanjutnya melakukan kebijakan sanering uang, membekukan simpanan giro dan deposito

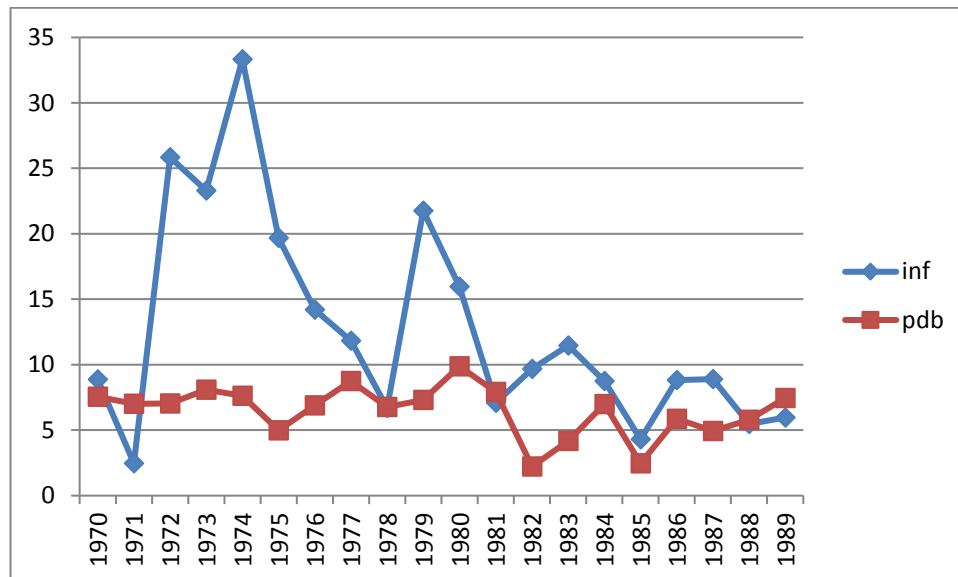
sebesar 90% yang nantinya akan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Namun ternyata kebijakan pembatasan penyaluran kredit ini membuat perbankan menjadi kurang produktif dan menghambat perbankan di Indonesia untuk berkembang. Sehingga kebijakan pembatasan kredit tersebut diganti dengan kebijakan meningkatkan *cash ratio*, dan hasilnya kredit yang diberikan menjadi meningkat. Selain itu juga dilakukan pengawasan kredit secara kuantitatif terhadap sektor berorientasi ekspor dan sektor yang produktif (bi.go.id).

Pada tahun 1966 terjadi peristiwa Supersemar yang ditandai dengan perpindahan pemerintahan dari orde lama ke orde baru. Pada periode ini inflasi masih menjadi permasalahan dalam perekonomian di Indonesia, dimana terjadi hiperinflasi akibat dari peristiwa PKI. Hal ini terbukti dari dibentuknya Kabinet Ampera yang bertugas untuk melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi salah satunya terhadap tingkat inflasi. Untuk menurunkan hiperinflasi, kebijakan-kebijakan moneter antara lain peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan hingga 30%, peningkatan tingkat suku bunga perbankan, penerapan pagu ekspansi aktiva neto perbankan dan larangan pemberian kredit jangka panjang serta kredit impor terutama yang bersiat konsumtif (bi.go.id).

Pada tahun 1983 harga minyak dunia mengalami penurunan sehingga menyebabkan tekanan pada perekonomian Indonesia. Selain itu daya saing produk Indonesia menurun, hal ini dikarenakan nilai rupiah *over valued* akibat dari tingginya inflasi di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia semakin menurun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan antara lain adalah dengan memberikan kebebasan kepada bank pemerintah dalam menetapkan suku bunga deposito, ketentuan pagu kredit dihapuskan, dalam mempengaruhi uang beredar Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

dan menyediakan fasilitas diskonto. Pada tahun 1984 perekonomian Indonesia meningkat, tetapi peningkatan perekonomian Indonesia juga diikuti dengan meningkatnya laju inflasi.

Gambar 4.1 : Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan PDB (%)

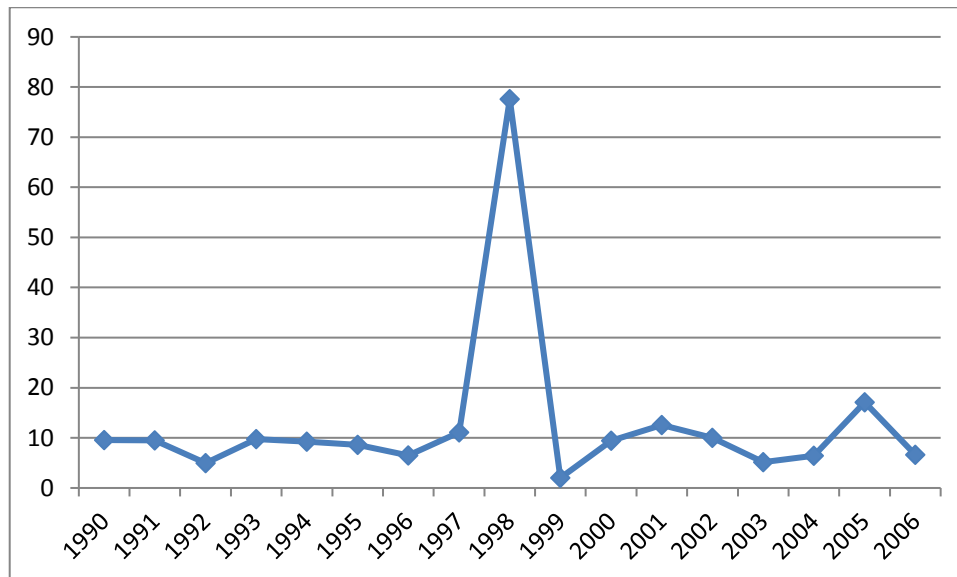


Sumber : Data diolah IMF dan BPS, 2017

Periode ini ditetapkan kebijakan Juni 1983, yang pada intinya bertujuan untuk mendorong sektor swasta melalui optimalisasi mobilisasi dana masyarakat. Oleh karena itu tingkat suku bunga dan nilai tukar dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Ketetapan GWM pada sebelumnya sebesar 30% diturunkan menjadi 15% pada Juni 1983 dan kembali mengalami penurunan pada oktober menjadi 2%, hal ini bertujuan agar meningkatkan efisiensi operasional perbankan. Dengan adanya kebijakan ini menyebabkan bank sentral tidak lagi mengendalikan moneter secara langsung. Disisi lain, dengan adanya kebijakan tersebut menyebabkan pembangunan ekonomi Indonesia menjadi relatif lebih cepat. Selain itu membanjirnya pinjaman-pinjaman luar negeri yang membiayai sektor properti, *shopping center* dan juga otomotif menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi *over-heated* (bi.go.id). Pada tahun 1997 inflasi melambunga

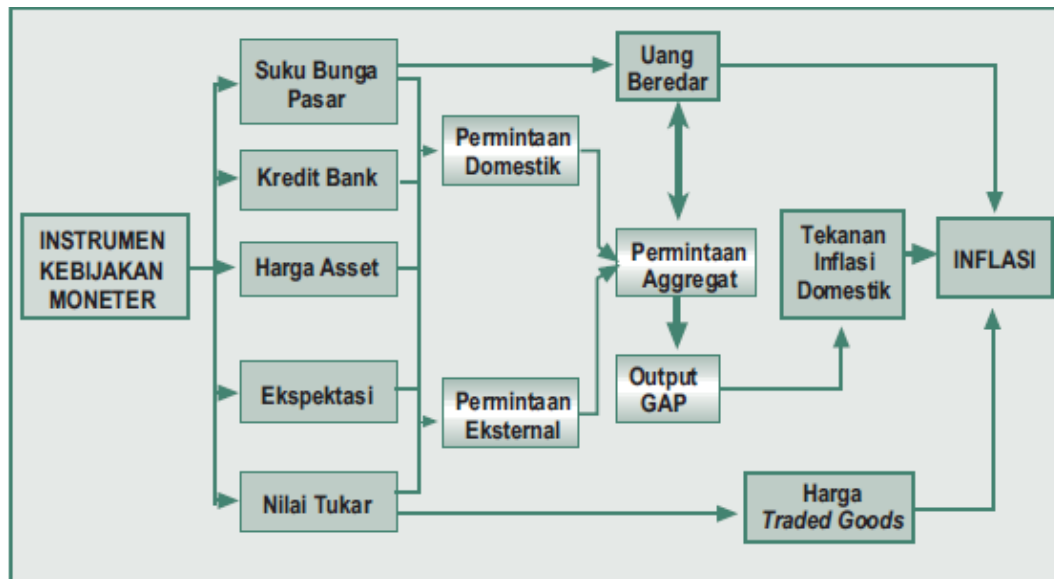
mencapai 77,63%, selain itu juga terjadi *rush* dana yang terjadi pada 16 bank dan terdepresiasi nilai rupiah hingga 300% pada awal tahun 1998.

Gambar 4.2 : Tingkat Inflasi Sebelum dan Sesudah Krisis 1998



Sumber : Data diolah IMF, 2017

Pada periode setelah krisis moneter 1998, perkembangan perekonomian Indonesia sudah mulai membaik. Kebijakan pada periode ini lebih bertujuan untuk memperkuat fundamental ekonomi secara makro, antara lain dalam bentuk keuangan dan kondisi moneter yang stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari keluarnya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, setelah dikeluarkan peraturan tersebut maka Bank Indonesia menjadi lembaga independen. Dengan sifatnya yang independen diharapkan Bank Indonesia menjadi lebih leluasa dalam menentukan target inflasi dan arah kebijakan moneter. Selain itu kesetabilan harga juga menjadi tujuan yang hendak dicapai pemerintah. Untuk mencapai tujuan akhir yang akan dicapai tersebut maka dilakukan pemantauan terhadap mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor riil yang melalui beberapa jalur antara lain adalah (1) jalur uang, (2) jalur kredit, (3) jalur suku bunga, (4) jalur nilai tukar, (5) jalur ekspektasi (bi.go.id).

Gambar 4.3 : Transmisi Kebijakan Moneter

Sumber : Bank Indonesia, 2017

4.1.2 Sejarah Kebijakan Fiskal Indonesia

Terdapat beberapa periode dalam perkembangan kebijakan fiskal di Indonesia. yang pertama adalah perkembangan kebijakan fiskal di era UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pada intinya tidak hanya sebagai konstitusi politik saja, tetapi juga sebagai arah dalam setiap kebijakan dalam perekonomian dalam artian UUD 1945 juga sebagai konstitusi ekonomi Indonesia. Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Selain itu juga telah disebutkan tugas negara dalam perekonomian dalam Pasal 34 bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*". Oleh karena itu sudah jelas bahwa setiap sektor ekonomi strategis yang dapat menaungi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, sehingga sektor strategis tersebut harus bebas dari pihak swasta. Hal ini dimaksudkan agar seluruh sektor strategis tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara guna memakmurkan kehidupan masyarakat.

Pada Pasal 23 dalam UUD 1945 juga disebutkan tentang keuangan negara, anggaran, perpajakan pemeriksaan keuangan dan Badan Keuangan dan juga mengenai perbankan. Dalam Pasal 23 terdapat 5 ayat (berdasarkan amandemen tahun 18 Agustus 2009), ayat (1) menjelaskan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu (2) segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang; (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang; (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang; dan (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu hasil pemeriksaan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

Selanjutnya pada periode Konstitusi RIS 1949, penjelasan tentang keuangan negara sebenarnya dibahas lebih rinci dari pada UUD 1945. Penjelasan keuangan negara dibahas di dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 173. Pada Pasal 164 Konstitusi RIS 1949 berisi tentang, (1) Di seluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanya diakui sah, alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang federal; (2) Satuan hitung untuk menyatakan alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang federal; (3) Undang-undang federal mengakui sah Alat-alat pembayar baik hingga jumlah yang tak terbatas maupun hingga jumlah terbatas yang ditentukan untuk itu; (4) Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat ataupun oleh bank-sirkulasi. Selanjutnya pada Pasal 165 Konstitusi RIS 1949 berbunyi, (1) Untuk Indonesia ada satu banksirkulasi; (2) Penunjukkan sebagai bank sirkulasi dan pengaturan taatan dan kekuasaan dilakukan dengan undang-undang federal.

Sedangkan Pasal 166 menentukan: (1) Pemerintah memegang pengurusan umum keuangan federal; (2) Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin dan ditanggung jawabkan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

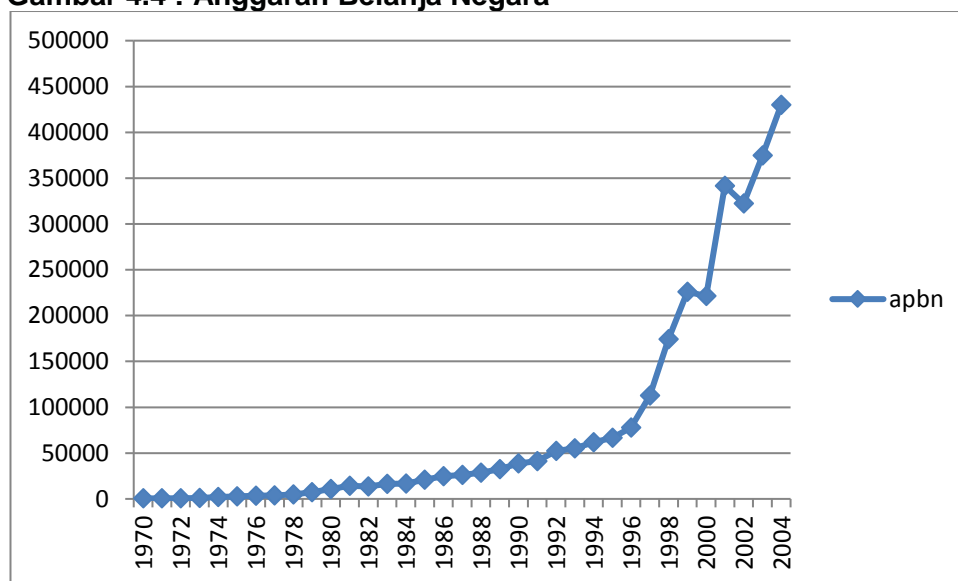
Selanjutnya pada Pasal 167 Konstitusi RIS 1949 berbunyi, Dengan undang-undang federal yang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia Serikat dan ditunjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu. Lebih lanjut lagi, Pasal 168 menentukan pula: (1) Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu. Pada masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun; (2) Usul undang-undang perubahan anggaran umum, tiap-tiap kali jika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ayat yang lalu dirundingkan pula oleh Senat atas dasar ketentuan-ketentuan. Selanjutnya penentuan anggaran negara ditetapkan pada Pasal 169 Konstitusi RIS 1949, (1) Anggaran terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing, sekedar perlu, dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menunjuk pendapatan-pendapatan. Bab-bab terbagi dalam pos-pos (2) Untuk tiap-tiap departemen kementerian anggaran sedikit dikitnya memuat satu bagian; (3) Undang-undang menetapkan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian; (4) Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

Secara umum kebijakan fiskal di Indonesia ditetapkan atas dasar asas kebersamaan, sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Dengan adanya asas kebersamaan dalam penetapan kebijakan fiskal nasional, dapat

diindikasikan bahwa kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sumberdaya dengan tujuan agar tujuan nasional dapat tercapai. Pengintegrasian ini meliputi seluruh elemen, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Jika dilihat dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2004, anggaran belanja negara (APBN) terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini,

Gambar 4.4 : Anggaran Belanja Negara



Sumber : Data diolah IMF, 2017

Hal ini menunjukkan bahwa, pemerintah berusaha untuk melakukan ekspansi dengancara menambah anggaran belanja negara guna untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat sesuai dengan tujuan yang hndak dicapai dalam UUD 1945. Menurut Sadikin (2010), pengeluaran pemerintah selalu mengalami peningkatan walaupun tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sedangkan menurut Wagner (1958) dalam Suheli (2012), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dari tahun ketahu selalu meningkat, hal ini dikarenakan upaya dalam peningkatan perekonomian selain itu juga karena adanya peningkatan ukuran beban operasional yang ditanggung

pemerintah. Hal ini menjadi menarik, karena apakah benar pengeluaran pemerintah yang terus meningkat akan diikuti dengan peningkatan tingkat inflasi.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode VAR/VECM dalam mengolah data untuk memperoleh hasil penelitian. Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian VAR/VECM akan dijelaskan berikut ini,

4.2.1 Uji Stasioneritas

Dalam pengujian menggunakan model VAR/VECM, sangat diperlukan pengujian stasioneritas data. Hal ini dikarenakan stasioneritas data sangat penting karena data yang tidak stasioner akan mempengaruhi hasil regresi yang dilakukan, data yang dianggap stasioner apabila nilai rata-rata dan variansnya konstan sepanjang waktu dan nilai kovarian antara dua periode waktu hanya tergantung pada selisih atau selang antara dua periode waktu tersebut bukan waktu sebenarnya ketika kovarian tersebut dihitung (Gujarati, 2003). Jika data yang diregresi tidak stasioner maka akan menghasilkan hasil regresi palsu. Ada beberapa pengujian yang dilakukan dalam menguji stasioneritas data, salah satu yang sering digunakan adalah uji *Unit Root Test*. Uji *Unit Root Test* yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Augmented Dickey Fuller Test*. Hipotesis yang digunakan dalam uji stasioneritas data adalah sebagai berikut :

H_0 : data tidak stasioner

H_1 : data stasioner

Jika nilai probabilitas < dari angka toleransi yaitu 0,05% maka H_0 diterima, dan artinya variabel tersebut stasioner.

Tabel 4.1 : Uji ADF

Variabel Penelitian	Signifikan 1 st Different
Inflasi (inf)	-0.684405 (0.0000)
Tingkat Suku Bunga (r)	-0.684405 (0.0000)
Pengeluaran Pemerintah (Gov)	-4781172 (0.0003)
Jumlah Uang Beredar (JUB)	-9242092 (0.0000)

Sumber : Data diolah Eviews, 2017

Uji stasioneritas variabel inflasi dalam penelitian ini menghasilkan angka probabilitas sebesar 0,0000, seperti yang ditunjukkan gambar hasil uji stasioneritas diatas. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai prob < nilai kritis sehingga H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi signifikan di *1st different*.

Selanjutnya adalah pengujian stasioneritas data pada variabel tingkat suku bunga. Hasil pengujian variabel tingkat suku bunga adalah sebagai berikut ini, uji stasioneritas variabel tingkat suku bunga dalam penelitian ini menghasilkan angka probabilitas sebesar 0,0000, seperti yang ditunjukkan gambar hasil uji stasioneritas diatas. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai prob < nilai kritis sehingga H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi signifikan di *1st different*.

Selanjutnya adalah pengujian stasioneritas data pada variabel tingkat pengeluaran pemerintah. Uji stasioneritas variabel pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini menghasilkan angka probabilitas sebesar 0,0003, seperti yang ditunjukkan gambar hasil uji stasioneritas diatas. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai prob < nilai kritis sehingga H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi signifikan di *1st different*.

Selanjutnya adalah pengujian stasioneritas data variabel JUB. Uji stasioneritas variabel JUB dalam penelitian ini menghasilkan angka probabilitas sebesar 0,0000, seperti yang ditunjukkan gambar hasil uji stasioneritas diatas. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai prob < nilai kritis sehingga H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel JUB signifikan di 1^{st} different.

Dengan hasil yang diperoleh dari pengujian stasioneritas data yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel inflasi, tingkat suku bunga, pengeluaran pemerintah dan tingkat JUB telah stasioner pada tingkat 1^{st} different. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas tiap variabel yang lebih kecil dari pada tingkat toleransi kesalahan yang digunakan dalam penelitian. Tahapan selanjutnya adalah pengujian panjang lag optimum.

4.2.2 Penentuan Lag Optimum

Penentuan panjang lag digunakan untuk mengetahui waktu yang diperlukan suatu variabel dalam merespon pengaruh dari variabel lainnya. Dalam penentuan lag yang dilakukan, terdapat beberapa indikator yang digunakan yaitu, LR FPE, AIC, SC dan HQ. Dalam penentuan panjang lag yang dilakukan, lag optimal ditunjukkan oleh nilai terendah dari indikator atau criteria tersebut. Dan hasilnya akan ditunjukkan dengan tanda bintang (*) sesuai dengan alat yang digunakan untuk menganalisis. Hasil dari penentuan panjang lag dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

Table 4.2 : Penentuan Panjang Lag

lag	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	NA	5.1211	-12.34357	-12.17974	-12.28316
1	354.8143*	9.5315*	-20.93661*	-20.11744*	-20.63453*

Sumber : Data diolah Eviews, 2017

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa, panjang lag yang digunakan adalah adalah pada lag ke 1, hal ini dapat dilihat dari jumlah tanda bintang (*)

yang terdapat pada lag ke 1, yakni terdapat pada indikator LR, FPE, AIC dan HQ. setelah dilakukan uji lag optimum. Maka selanjutnya adalah pengujian kointegrasi pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2.3 Uji Kointegrasi Johansen

Pada pengujian stasioneritas yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa setiap variabel dalam penelitian telah stasioner pada tingkat 1st different, maka perlu adanya pengujian kointegrasi. Uji kointegrasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel dalam model, khususnya untuk melihat hubungan jangka panjang antar variabel. Uji kointegrasi Johansen ini dilakukan dengan selang optimal atau lag yang sesuai dengan penentuan asumsi deterministik yang melandasi persamaan kointegrasi. Hasil dari uji kointegrasi Johansen yang telah dilakukan pada variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut ini,

Table 4.3 : Hasil Uji Kointegrasi

Trace stat	Critical value	Prob	Eigen stat	Critical value	Prob	kointegrasi
63.89655	47.85613	0.0008	39.61773	27.58434	0.0009	1
24.27882	29.79707	0.1889	14.60923	21.13162	0.3172	0
9.669595	15.49471	0.3070	7.294174	14.26460	0.4549	0
2.375421	3.841466	0.1233	2.375421	3.841466	0.1233	0

Sumber : Data diolah Eviews, 2017

Dari hasil pengujian kointegrasi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat kointegrasi antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dapat dilihat dari *trace statistic* yang dibandingkan dengan nilai *trace* dengan derajat kesalahan sebesar 0,05% dan juga dengan melihat *Max-Eigen Statistic* yang dibandingkan dengan nilai *Max-Eigen* dengan derajat kesalahan sebesar 0,05%. Dengan melihat hasil uji kointegrasi pada indikator *trance*, maka dapat diperoleh hasil yaitu terdapat kointegrasi sebanyak 1 variabel dan pada *Max-Eigen* terdapat kointegrasi sebanyak 1 variabel. Dengan hasil yang diperoleh

pada uji kointegrasi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

4.2.4 Uji Kausalitas Granger

Pengujian kausalitas ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Adapun hasil dari pengujian kausalitas antar variabel adalah sebagai berikut ini,

Tabel 4.4 : Hasil uji Kausalitas Granger

GOV does not granger cause INF	0.6864
INF does not granger cause GOV	0.0005
JUB does not granger cause INF	0.0214
INF does not granger cause JUB	0.9675
R does not granger cause INF	0.0017
INF does not granger cause R	0.0004
JUB does not granger cause GOV	0.0482
GOV does not granger cause JUB	0.6891
R does not granger cause GOV	0.0001
GOV does not granger cause R	0.0249

Sumber : Data diolah Eviews, 2017

Dari hasil diatas dapat diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan satu arah antara variabel pengeluaran pemerintah terhadap tingkat inflasi, inflasi terhadap JUB, Pengeluaran pemerintah terhadap JUB, selain itu terdapat hubungan 2 arah antara variabel inflasi dan tingkat suku bunga, variabel tingkat suku bunga dan pengeluaran pemerintah

4.2.5 Uji *Vector Error Correction Model* (VECM)

Dari pengujian kointegrasi yang telah dilakukan, menghasilkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan jangka panjang. Sehingga digunakan model *Vector Error Correction Model* (VECM).

Tabel 4.5 : Hasil Uji VECM

Variabel	Jangka Pendek	Jangka Panjang	ECT	t-table
INF	0.494288 (2.98716)	-	-2.385179 (-9.32904)	2.021
GOV	-0.000934 (-0.01219)	-0.115598 (-3.69517)		
R	0.179194 (0.91836)	0.346965 (3.44687)		
JUB	0.317306 (3.69781)	0.188346 (2.17767)		

Sumber : Data diolah Eviews, 2017

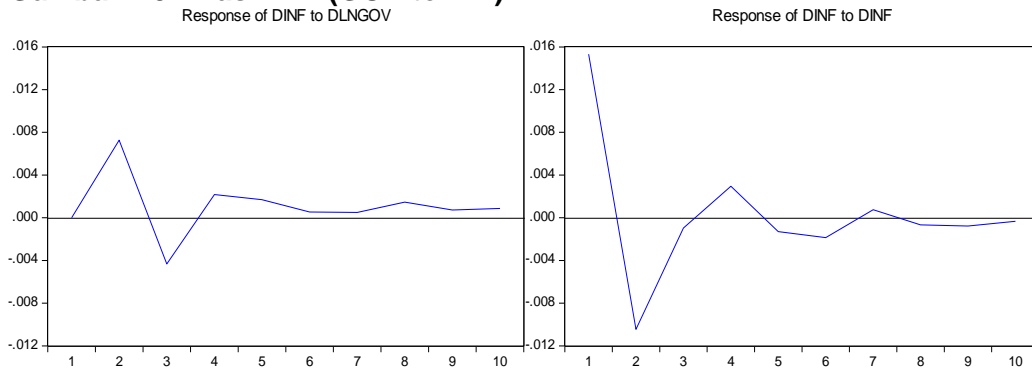
Dari table diatas dapat diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek variabel inflasi memiliki hubungan secara signifikan dengan variabel inflasi pada periode sebelumnya (INF_{t-1}) dengan koefisien positif, hubungan yang tidak dengan variabel pengeluaran pemerintah dengan koefisien negatif, memiliki hubungan dengan variabel tingkat suku bunga dengan koefisien positif dan JUB dengan koefisien positif. Namun jika dilihat dari nilai *t-statistic*, hanya variabel inflasi periode sebelumnya yang berhubungan signifikan dengan variabel inflasi sementara variabel tingkat suku bunga, pengeluaran pemerintah dan JUB mempunyai hubungan yng tidak signifikan.

Sementara untuk jangka panjang variabel inflasi memiliki hubungan dengan variabel pengeluaran pemerintah dengan koefisien negatif, dan juga memiliki hubungan dengan variabel JUB dan tingkat suku bunga dengan koefisien positif, variabel tingkat pengeluaran pemerintah secara signifikan berhubungan dengan inflasi, begitu juga dengan variabel JUB dan tingkat suku bunga yang signifikan. Sementara nilai dari *speed of adjustment* sebesar -2.385179 dengan nilai *t-statistic* sebesar --9.32904 yang artinya signifikan secara statistik, yang artinya bahwa pada tahun pertama sudah bisa dilakukan penyesuaian atas ketidak seimbangan karena adanya goncangan yang terjadi.

4.2.6 *Impulse Response Function (IRF)*

Setelah hasil yang diperoleh dari uji kausalitas dan kemudian uji VECM, selanjutnya adalah melihat seberapa jauh atau tenggang waktu yang diperlukan oleh suatu variabel untuk merespon goncangan atau perubahan dari variabel lainnya, maka untuk melihat hasil tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan IRF. Dengan menggunakan IRF kita bisa melihat setiap respon suatu variabel jika terdapat goncangan pada variabel lain dalam penelitian ini, dalam hal ini adalah *shock* yang terjadi pada variabel pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar yang akan direspon oleh variabel inflasi. Menurut Hudaya (2011), IRF dapat menggambarkan ekspektasi k-periode ke depan dari kesalahan prediksi suatu variabel akibat inovasi dari variabel yang lainnya. Maka dari itu, lamanya pengaruh dari goncangan yang terjadi yang mempengaruhi variabel lain sampai pengaruhnya kembali menghilang atau bisa juga kembali pada titik keseimbangan dapat diketahui.

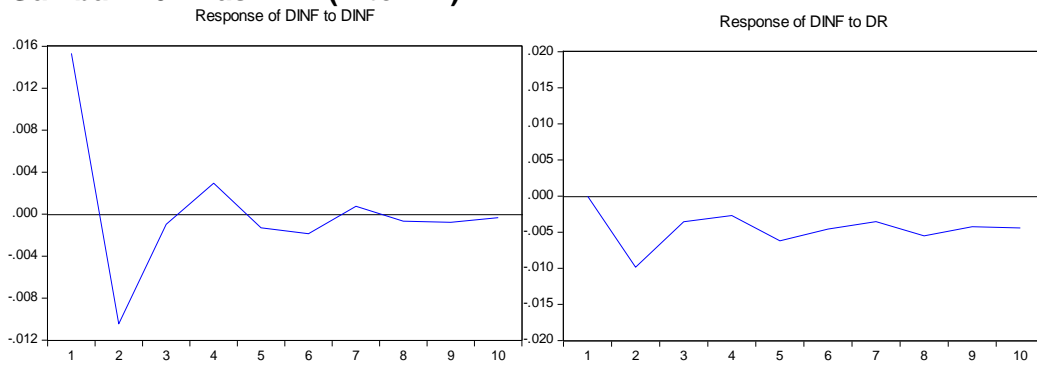
Sesuai dengan hasil pengujian kausalitas yang sudah dilakukan, diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah terhadap tingkat inflasi, inflasi terhadap JUB, Pengeluaran pemerintah terhadap JUB, tingkat suku bunga terhadap pengeluaran pemerintah, selain itu terdapat hubungan 2 arah antara variabel inflasi dan tingkat suku bunga,

Gambar 4.5 : Hasil IRF (GOV to INF)

Sumber : Data diolah Eviews, 2017

Gambar sebelah kiri menunjukkan respon variabel inflasi terhadap perubahan variabel inflasi periode sebelumnya. Dapat dilihat ketika terjadi perubahan pada variabel inflasi periode sebelumnya mengalami gonjangan atau perubahan menyebabkan variabel inflasi mengalami penurunan secara drastis pada periode ke dua (-0.0105) bahkan sampai melewati garis keseimbangan (0). Tetapi pada periode ketiga inflasi kembali meningkat (-0.0010). Peningkatan berlanjut pada periode ke empat, pada periode selanjutnya tingkat inflasi pergerakannya lebih berfluktuatif. Selanjutnya respon variabel inflasi terhadap goncangan atau perubahan yang terjadi pada variabel pengeluaran pemerintah. Ketika terjadi goncangan pada variabel pengeluaran pemerintah pada periode ke dua direspon dengan meningkatnya inflasi hingga ke titik 0.0073, namun pada periode ke tiga tingkat inflasi mengalami penurunan (-0.0043) hingga melewati garis keseimbangan. Periode selanjutnya tingkat inflasi kembali meningkat dan pergerakannya lebih berfluktuatif dan selalu diatas titik keseimbangan.

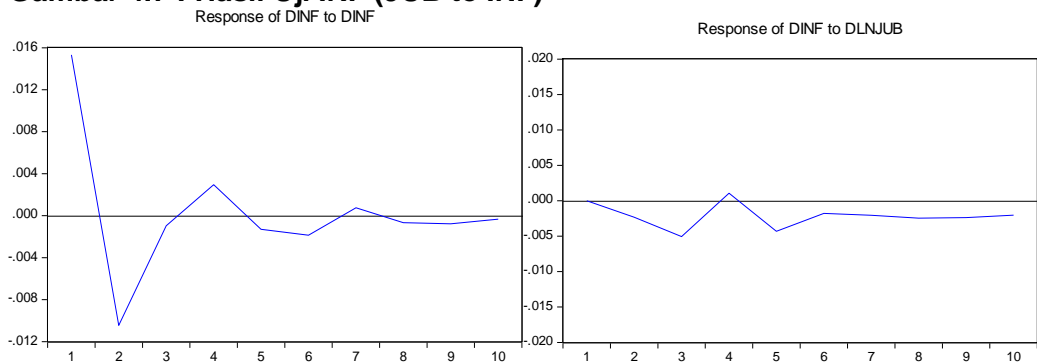
Selanjutnya adalah hubungan antara variabel tingkat suku bunga dan tingkat inflasi, dimana kedua variabel ini memiliki hubungan dua arah sesuai dengan hasil pengujian kausalitas yang sudah dilakukan.

Gambar 4.6 : Hasil IRF (R to INF)

Sumber : Data diolah Eviews, 2017

Selanjutnya adalah melihat bagaimana respon tingkat inflasi jika terjadi guncangan pada variabel tingkat suku bunga. Jika dilihat dari hasil yang diperoleh (gambar kanan bawah), menunjukkan bahwa guncangan yang terjadi pada tingkat suku bunga langsung direspon negatif oleh tingkat inflasi, dimana pada periode pertama tingkat inflasi berada pada titik keseimbangan namun tingkat inflasi mengalami penurunan hingga pada titik (-0.0105). Selanjutnya pada periode ke tiga dan keempat tingkat inflasi terus mengalami peningkatan tetapi periode selanjutnya pergerakan tingkat inflasi bergerak secara fluktuatif hingga periode sepuluh.

Selanjutnya adalah hubungan antara variabel JUB dengan variabel tingkat inflasi di Indonesia. Hubungan antara variabel tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini,

Gambar 4.7 : Hasil Uji IRF (JUB to INF)

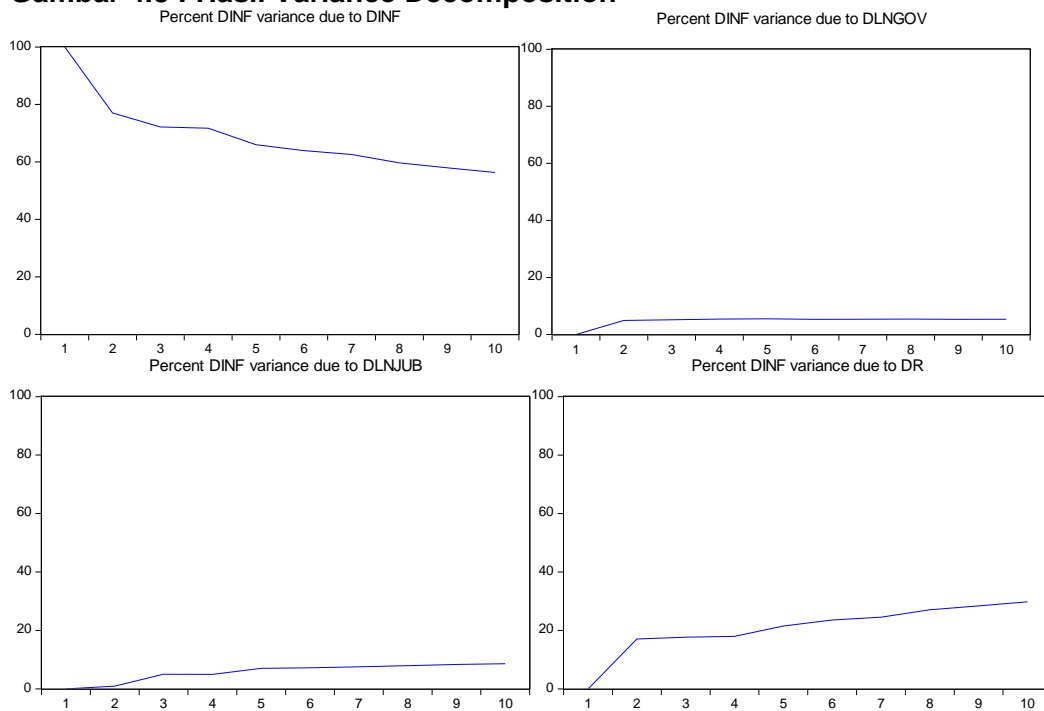
Sumber : Data diolah Eviews, 2017

Dari hasil diatas diketahui bahwa, ketika ada guncangan pada variabel JUB langsung direspon dengan turunnya tingkat inflasi pada period dua dan tiga tetapi tingkat inflasi kembali meningkat pada periode ke empat dan kembali turun di periode ke lima dan selanjutnya pergerakannya berfluktuatif.

4.2.7 Variance Decomposition

Setelah dilakukan uji menggunakan IRF, maka dilakukan uji *Variance Decomposition*. Menurut Hudaya (2011), VD dapat digunakan untuk memisahkan variasi dari sejumlah variabel yang diestimasi menjadi komponen-komponen *shock* atau menjadi variabel *innovation* dengan asumsi bahwa variabel-variabel *innovation* tidak saling berkorelasi. Selanjutnya VD akan memberikan informasi tentang proporsi dari setiap guncangan pada suatu variabel terhadap variabel lain pada periode tertentu.

Gambar 4.8 : Hasil Variance Decomposition



Sumber : Data diolah Eviews, 2017

Dari hasil VD pada table 4.6 dapat diketahui bahwa pada periode pertama inflasi masih dipengaruhi oleh variabel inflasi itu sendiri yaitu sebesar 100 %, pada periode selanjutnya variabel tingkat suku bunga, JUB dan

pengeluaran pemerintah mulai memberikan kontribusi kepada tingkat inflasi di Indonesia.

4.3 Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian terhadap seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian, tahap selanjutnya adalah dilakukan pembahasan dari hasil pengujian yang telah dilakukan.

4.3.1 Matriks Hasil Penelitian

Penggunaan matriks hasil penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dalam membaca hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dibawah ini adalah matriks hasil penelitian,

Tabel 4.6 : Matriks Hasil Penelitian

Variabel Penelitian	Hubungan dengan Inflasi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Inflasi (t-1)	Berhubungan (+)	
Suku bunga	Tidak (+)	Berhubungan (+)
Pengeluaran pemerintah	Tidak (-)	Berhubungan (-)
JUB	Berhubungan (+)	Berhubungan (+)

Sumber : Data diolah Eviews, 2017

4.3.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, JUB, Tingkat Suku Bunga dengan Inflasi

Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa variabel inflasi pada periode sebelumnya memiliki hubungan dengan variabel inflasi dengan koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ekspektasi masyarakat akan tingkat inflasi pada periode sebelumnya yang pada akhirnya memiliki hubungan dengan tingkat

inflasi. Hal ini sesuai dengan teori kuantitas, yang mana inflasi ditentukan oleh perilaku dan harapan masyarakat akan inflasi tersebut (Boediono, 2014). Artinya dalam jangka pendek, ekspektasi masyarakat akan inflasi pada periode sebelumnya memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat inflasi, dan ekspektasi tersebut cenderung menyebabkan peningkatan pada tingkat inflasi.

Selanjutnya adalah hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat inflasi. Secara teori pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif terhadap tingkat inflasi, sehingga ketika terjadi peningkatan pada pengeluaran pemerintah maka akan diikuti dengan peningkatan inflasi karena jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan ada peningkatan jumlah uang beredar, sesuai dengan teori Keynes. Hal ini didukung dengan adanya hubungan kausalitas yaitu pengeluaran pemerintah memiliki hubungan terhadap JUB. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat, jika terjadi permintaan yang berlebihan maka akan meningkatkan inflasi. Menurut Muharman (2013), pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap inflasi, ketika terjadi ekspansi fiskal dengan meningkatkan belanja negara maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan akan menciptakan permintaan pada masyarakat sehingga akan meningkatkan angka inflasi, hal ini sesuai dengan teori *demand pull inflation*.

Pada periode penelitian yang dilakukan (2005 s/d 2015) dapat dijelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah Indonesia memiliki hubungan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Dimana pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif terhadap tingkat inflasi dengan koefisien (-0.000934) tetapi hubungan ini tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ketika pemerintah

meningkatkan pengeluaran atau anggran belanja negara maka akan menyebabkan turunnya inflasi di Indonesia tetapi penurunan tersebut tidak begitu signifikan, menurut Hamzah dan Sofilda (2006), hubungan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi di Indonesia tidak signifikan dikarenakan adanya kesalahan alokasi. Dimana terjadi peningkatan dalam alokasi pembayaran hutang yang terus meningkat. Sebaliknya dalam jangka panjang hubungan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat inflasi memiliki hubungan yang signifikan dan memiliki koefisien negatif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Surjaningsih et al (2012), Sutawijaya dan Lestari (2013), dimana guncangan yang terjadi pada variabel pengeluaran pemerintah menyebabkan menurunnya tingkat inflasi. Hal ini disebabkan karena dampak multiplier dari pengeluaran pemerintah terutama dari pengeluaran di sektor infrastruktur, karena dengan bertambah baiknya infrastruktur di Indonesia dapat menyebabkan mempermudah distribusi barang dan jasa.

Selain itu pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian pada sektor riil, dengan cara berusaha untuk mengembangkan sektor riil. Dimana pemerintah memberikan jaminan melalui alokasi anggaran untuk program kredit usaha rakyat. Penyaluran program ini dari tahun 2007 s/d 2014 telah mencapai 159,2 Triliun dengan jumlah debitur sebanyak 12.145.201 debitur. Hal ini dikarenakan sektor UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian nasional dan juga berperan dalam menopang ekonomi nasional (kemenkeu.go.id) dan dukungan pemerintah terhadap sektor riil (UMKM) tercermin dalam alokasi APBN melalui alokasi dana begulir. Dengan tumbuhnya sektor riil maka dapat memberikan dampak pada perekonomian, dalam hal ini ketersediaan output yang dibutuhkan masyarakat dapat tercukupi sehingga tidak terjadi kelangkaan barang dan jasa, dengan begitu tingkat inflasi dapat ditekan. Hubungan dengan arah negatif antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat inflasi juga didukung oleh data

peningkatan pengeluaran pemerintah yang terus meningkat dari tahun ketahun tidak diiringi dengan peningkatan inflasi di Indonesia.

Selanjutnya hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat inflasi, dimana secara teori tingkat suku bunga terhadap tingkat inflasi mempunyai hubungan negatif. Dimana ketika dilakukan kebijakan moneter ketat dengan meningkatkan tingkat suku bunga maka akan menyebabkan inflasi menurun karena dengan suku bunga yang tinggi akan ada kecenderungan pemegang uang untuk menempatkan uangnya ke bank. Menurut teori *loanable fund* Tingkat suku bunga dibentuk dari permintaan dan penawaran akan dana. Ketika permintaan akan dana meningkat maka akan menyebabkan bertambahnya dana di masyarakat sehingga dapat menyebabkan inflasi, meningkatnya inflasi akan mendorong meningkatnya tingkat suku bunga, sebaliknya jika permintaan berkurang maka akan menyebabkan suku bunga turun.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, terdapat hubungan antara variabel tingkat suku bunga dan tingkat inflasi di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Tetapi hubungan tingkat suku bunga dan tingkat inflasi di Indonesia dalam jangka pendek tidak signifikan. Hal ini dikarenakan adanya transmisi yang terjadi dalam kebijakan moneter, seperti halnya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Afandi (2015). Ketika inflasi meningkat maka akan direspon Bank Indonesia dengan meningkatkan tingkat suku bunga dengan tujuan agar uang di masyarakat akan berkurang. Tetapi ketetapan tingkat suku bunga tersebut tidak langsung direspon oleh bank umum sehingga ketika tingkat suku bunga meningkat tetapi tingkat inflasi tetap karena uang di masyarakat masih tetap sehingga inflasi dan tingkat suku bunga berjalan searah.

Sementara untuk jangka panjang memiliki hubungan signifikan tetapi memiliki koefisien yang positif, sehingga ketika tingkat suku bunga menurun maka akan menyebabkan inflasi menurun, begitu juga sebaliknya ketika tingkat suku bunga meningkat maka akan diikuti dengan peningkatan inflasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pradipta (2011), dimana menurut Pradipta tingkat suku bunga memberikan pengaruh positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia, sehingga ketika tingkat suku bunga rendah juga diikuti oleh tingkat inflasi yang rendah juga. Dalam hal ini tingkat suku bunga dan tingkat inflasi memiliki hubungan dua arah, dimana tingkat suku bunga mempengaruhi inflasi dan sebaliknya inflasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat suku bunga. Senada dengan teori dari Indrawati (1996) dimana ketika terjadi peningkatan inflasi maka Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga, dengan meningkatnya tingkat suku bunga maka akan direspon oleh tingkat bunga tabungan dan kredit pada bank umum. Dengan adanya peningkatan tingkat suku bunga maka akan mengurangi minat investasi sektor riil sehingga produksi output akan berkurang. Dengan asumsi bahwa permintaan akan output yang konstan, dengan adanya penurunan produksi output ini akan menyebabkan meningkatnya inflasi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga memiliki hubungan positif terhadap tingkat inflasi.

Tingkat suku bunga mungkin dapat mengurangi ekspektasi masyarakat akan inflasi dan akan mempengaruhi permintaan masyarakat. Namun dari sisi penawaran, dengan meningkatnya tingkat suku bunga dapat menyebabkan meningkatnya biaya investasi disektor riil yang berdampak pada pengurangan jumlah output maupun peningkatan harga-harga output. Sehingga penetapan inflasi sebagai salah satu cara yang digunakan dalam mengendalikan inflasi yang

terjadi perlu ditetapkan dengan hati-hati. Karena penetapan suku bunga memiliki efek yang berlawanan antara sisi permintaan dan penawaran.

Selain itu inflasi di Indonesia memiliki karakteristik sendiri, penyebab dari tingkat inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh variabel ekonomi saja, tetapi juga karena faktor kondisi alam dan karena efek dari hari-hari besar keagamaan. Dimana puncak inflasi di Indonesia adalah pada periode Desember-Januari dimana terjadi kenaikan harga-harga dikarenakan adanya perayaan Natal dan tahun baru, kemudian pada periode Juli-Agustus dimana terjadi perayaan Idul Fitri, hal ini dikarenakan terjadi konsumsi secara besar-besaran pada makanan dan barang-barang lainnya dan juga kecenderungan para pedagang untuk menaikkan harga (Indonesia investments).

Selanjutnya adalah hubungan antara JUB dengan tingkat inflasi di Indonesia, dimana secara teori antara JUB dan tingkat inflasi memiliki hubungan positif. Dimana ketika terjadi penambahan uang di masyarakat maka akan menyebabkan tingkat inflasi juga akan meningkat. Menurut Mishkin (2008), JUB memiliki hubungan positif terhadap tingkat inflasi, hal ini dikarenakan ketika ada penambahan uang di masyarakat maka akan menyebabkan kecenderungan peningkatan konsumsi yang dilakukan masyarakat karena masyarakat memegang uang dalam jumlah yang lebih dari yang sebelumnya.

Sementara hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa JUB memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia, dimana dalam jangka pendek JUB memiliki hubungan positif dengan tingkat inflasi di Indonesia begitu juga dalam jangka panjang JUB juga memiliki hubungan dengan tingkat inflasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada, dimana ketika terjadi penambahan uang maka akan menciptakan peningkatan tingkat inflasi. Menurut Mankiw (2007), penambahan peredaran uang dalam jumlah yang berlebihan

akan menyebabkan akan menyebabkan teradnya kenaikan harga melebihi tingkat yang diharapkan yang pada akhirnya akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi, dan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa negara dengan tingkat inflasi yang tinggi adalah negara dengan laju pertumbuhan uang yang tinggi juga . Selanjutnya menurut Langi *et al* (2014), juga mengatakan bahwa tingkat peredaran uang di masyarakat memiliki hubungan positif dengan tingkat inflasi di Indonesia.

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain bahwa :

1. Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang lebih efektif dalam hal mengatasi masalah tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek tidak memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia. artinya perubahan pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek tidak direspon tingkat inflasi di Indonesia. Sementara dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia, sehingga ketika ada perubahan pengeluaran pemerintah akan direspon tingkat inflasi di Indonesia.
2. Sementara tingkat suku bunga dalam jangka pendek tidak memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia. Artinya ketika dalam jangka pendek ketika ada perubahan pada tingkat suku bunga maka tidak direspon oleh inflasi. Sementara tingkat suku bunga dalam jangka panjang memiliki berhubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia, sehingga ketika dalam jangka panjang peningkatan tingkat suku bunga akan direspon oleh tingkat inflasi.
3. JUB dalam jangka pendek memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia, ketika terjadi perubahan pada JUB maka akan direspon tingkat inflasi di Indonesia, begitu juga dengan jangka panjang memiliki hubungan dengan tingkat inflasi di Indonesia. Artinya ketika terjadi penambahan JUB maka akan direspon oleh tingkat inflasi di Indonesia.

5.2 Saran

Jika melihat hasil dan pembahasan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang diberikan, antara lain adalah sebagai berikut ini,

1. Dalam penetapan pengeluaran pemerintah harus benar-benar dipertimbangkan dan selanjutnya adalah harus benar dan tepat dalam mengalokasikan setiap anggaran yang dikeluarkan ke setiap sektor.
2. Penetapan tingkat suku bunga dan JUB sebagai instrumen kebijakan moneter dalam mengatasi masalah tingkat inflasi harus ditetapkan dengan penuh pertimbangan dan hati-hati.
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens antara sektor moneter dan fiskal di Indonesia, karena permasalahan inflasi di Indonesia menjadi permasalahan yang rumit dan terus muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M.Z. 2015. Kebijakan Fiskal dan Peningkatan Peran Ekonomi UMKM. (<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/kebijakan-fiskal-dan-peningkatan-peran-ekonomi-umkm>). Diakses 20 Maret 2017.
- Afandi, Muhammad Anif. 2015. Determinasi Inflasi dari Sisi Supply (Cost-Push Inflation) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 16, No 2
- Alam S. 2006. *Ekonomi untuk SMA dan MA*. Jakarta : Elangga.
- Bank Indonesia. Data Tingkat Suku Bunga Di Indonesia. (<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx>). Diakses 20 Februari 2017.
- _____. Data Tingkat Inflasi di Indonesia. (<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>). Diakses 20 Februari 2017.
- _____. Sejarah Kebijakan Moneter di Indonesia. (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi2.aspx>). Diakses 3 Maret 2017.
- Boediono. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPFE.
- Case, Karl E. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid 2*. Jakarta : Erlangga.
- Case, Karl dan Fair, Ray. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi 8*. Erlangga. Jakarta.
- Danis, Ardiyanto. 2013. Analisa Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto di Indonesia : Pendekatan VECM. Skripsi Universitas Brawijaya.
- Devia, Vietha. 2012. Analisis Keseimbangan Tingkat Suku Bunga Dan GDP Di Indonesia : Tinjauan Interaksi Fiskal Dan Moneter (1998-2011). Thesis Universitas Brawijaya.
- Fitra, Safrezi. 2015. Inflasi 2014 Mencapai 8,36 Persen. (<http://katadata.co.id/berita/2015/01/02/inflasi-2014-mencapai-836-persen>). Diakses 20 Maret 2017.
- Granger, C. W. J. 1969. Investigating Causal Relations by Econometric models and Cross-Spectral Methods. *Econometrica*, Vol 37, No. 3
- Gujarati, Damodar. 2004. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. The McGraw-Hill Companies.
- Gujarati, Domar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga. Jakarta

- Hamzah, Muhammad Zilal dan Eleonora Sofilda. 2006. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia : Pendekatan Error Correction Model (ECM). *Jurnal Kebijakan EKonomi*. Vol 2, No 1
- Hudaya, Afqa. 2011. Analisis Kurs, Jumlah Uang Beredar, dan Suku Bunga SBI terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2001-2010. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Indonesia investments. 2017. Inflasi di Indonesia (Indeks Harga Konsumen). (<http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/inflasi-di-indonesia/item254?>). Diakses 20 Maret 2017.
- Indrawati, Sri Mulyani. 1996. *Teori Moneter*. Jakarta : Lembaga Penerbitan UI.
- Indrawati, Yulia. 2007. Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia : Pendekatan Vector Auto Regression. Universitas Jember.
- Jawadi, *et al.* 2015. Monetary and Fiscal Policies In BRICS : A Penel Approach. *Economic Modelling*.
- Kemendag. Data Jumlah Uang Beredar (JUB) Di Indonesia. (<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/amount-of-circulate-money>). Diakses 20 Februari 2017.
- Komaruddin. 1981. *Analisis Moneter dan Manajemen Keuangan*. Bandung.
- Langi, Theodores Manuel, Vecky Masinambow, Hanly Siwu. 2014. Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. Universitas Sam Ratulangi.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta : Erlangga.
- Miskhin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Salemba Empat
- Muharman, Berto. 2013. Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal Terhadap PDB dan Inflasi Di Indonesia. Vol 1 No 2. Universitas Brawijaya.
- Murni , Asifa. 2006. *Ekonomi Makro*. Jakarta : Refika Aditama.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter, Buku II. Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Pradipta, Ramadhan Krishna. 2011. Analisis Pengaruh BI Rate, Jumlah Uang Beredar, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2005-2010. Skripsi Universitas Brawijaya.

- Prasetyia, Ferry. 2011. *Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi*. Vol 5. Universitas Brawijaya.
- Rian andriono. 2012. *Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Pengendalian Inflasi Di Indonesia Periode 1991-2010*. Skripsi Universitas Brawijaya
- Samuelson, Paul A. 1997. *Ekonomi Jilid II*. Jakarta : Erlangga.
- Simorangkir, Iskandar. 2005. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia: Suatu Pendekatan dengan Game Theory. *PPSK Bank Indonesia Working Paper*.
- Simorangkir, Iskandar dan Justina Adamanti. 2010. Peran Stimulus Fiskal dan Pelonggaran Moneter Pada Perekonomian Indonesia Selama Krisis Finansial Global : Pendekatan Financial Computable General Equilibrium. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*
- Soediyono, Reksoprayitno. 2000. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi 6*. Yogyakarta : BPPE.
- Suheli, Lili. 2012. *Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Inflasi Di 5 Negara Anggota ASEAN*. Skripsi Universitas Brawijaya.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Sunariyah. 2006. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta : STIM-YKPN.
- Surasmono, Hesti Wahyudi. 2013. Mekanisme Transmisi Kebijakan Fiskal : Analisis data Makroekonomi Di Indonesia Dengan Pendekatan Structural Vector Auto Regresson. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Katholik Indonesia.
- Surjaningsih *et al*. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Sutawijaya, Andrian, Etty Puji Lestari. 2013. Penerapan Metode Vector Auto Regression dalam Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia. Universitas Terbuka.
- The global economy. *Data Pengeluaran Pemerintah Indonesia*. (http://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/government_spending_dollars/). Diakses 20 Desember 2016.
- Walsh, Carl E.. (2001). *Monetary Theory and Policy*. The MIT Press Cambridge.
- Wardana, Ali. 2002. Kebijakan Fiskal Dan Moneter Di Indonesia:Perbandingan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Islam Kalimantan.
- Warjiyo Perry. 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Seri Kebanksentralan No 11*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSk) Bank Indonesia.

Wijayanti, Kori. 2011. Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Bank Lending Channel Dan Interest Rate Channel. Skripsi. Universitas Brawijaya.

Worldbank. *Data Gross Domestic Product (GDP) Indonesia.*
(<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ID>).
Diakses 20 Desember 2016.

LAMPIRAN

Uji stasioneritas Inflasi

Null Hypothesis: INF has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.084405	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.592462	
5% level	-2.931404	
10% level	-2.603944	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(INF)
 Method: Least Squares
 Date: 03/17/17 Time: 22:58
 Sample (adjusted): 2005Q2 2015Q4
 Included observations: 43 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INF(-1)	-0.942625	0.154925	-6.084405	0.0000
C	0.016286	0.003806	4.278730	0.0001
R-squared	0.474494	Mean dependent var		-0.000484
Adjusted R-squared	0.461676	S.D. dependent var		0.023462
S.E. of regression	0.017214	Akaike info criterion		-5.240770
Sum squared resid	0.012149	Schwarz criterion		-5.158854
Log likelihood	114.6766	Hannan-Quinn criter.		-5.210562
F-statistic	37.01998	Durbin-Watson stat		1.983015
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji stasioneritas Suku Bunga

Null Hypothesis: D(R) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.181620	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.596616	
5% level	-2.933158	
10% level	-2.604867	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(R,2)

Method: Least Squares
Date: 03/17/17 Time: 22:59
Sample (adjusted): 2005Q3 2015Q4
Included observations: 42 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(R(-1))	-0.976801	0.158017	-6.181620	0.0000
C	0.001098	0.002615	0.419963	0.6768
R-squared	0.488572	Mean dependent var		4.55E-05
Adjusted R-squared	0.475787	S.D. dependent var		0.023360
S.E. of regression	0.016914	Akaike info criterion		-5.274956
Sum squared resid	0.011443	Schwarz criterion		-5.192210
Log likelihood	112.7741	Hannan-Quinn criter.		-5.244626
F-statistic	38.21243	Durbin-Watson stat		1.996409
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji stasioneritas Pengeluaran Pemerintah

Null Hypothesis: D(LNGOV) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.781172	0.0003
Test critical values: 1% level	-3.596616	
5% level	-2.933158	
10% level	-2.604867	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNGOV,2)
Method: Least Squares
Date: 04/22/17 Time: 11:47
Sample (adjusted): 2005Q3 2015Q4
Included observations: 42 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LNGOV(-1))	-0.608793	0.127331	-4.781172	0.0000
C	0.020278	0.007611	2.664331	0.0111
R-squared	0.363661	Mean dependent var		-0.003287
Adjusted R-squared	0.347753	S.D. dependent var		0.046539
S.E. of regression	0.037586	Akaike info criterion		-3.677925
Sum squared resid	0.056508	Schwarz criterion		-3.595179
Log likelihood	79.23643	Hannan-Quinn criter.		-3.647596
F-statistic	22.85961	Durbin-Watson stat		2.198588
Prob(F-statistic)	0.000024			

Uji stasioneritas JUB

Null Hypothesis: D(LNJUB) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.242092	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.596616	
5% level	-2.933158	
10% level	-2.604867	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(LNJUB,2)
 Method: Least Squares
 Date: 04/22/17 Time: 11:48
 Sample (adjusted): 2005Q3 2015Q4
 Included observations: 42 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LNJUB(-1))	-1.376446	0.148932	-9.242092	0.0000
C	0.047634	0.006069	7.848732	0.0000
R-squared	0.681062	Mean dependent var		-0.000607
Adjusted R-squared	0.673089	S.D. dependent var		0.035097
S.E. of regression	0.020067	Akaike info criterion		-4.933043
Sum squared resid	0.016107	Schwarz criterion		-4.850297
Log likelihood	105.5939	Hannan-Quinn criter.		-4.902713
F-statistic	85.41626	Durbin-Watson stat		2.030180
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Kointegrasi

Date: 03/17/17 Time: 22:57
 Sample (adjusted): 2005Q3 2015Q4
 Included observations: 42 after adjustments
 Trend assumption: Linear deterministic trend
 Series: INF LNGOV LNJUB R
 Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.610651	63.89655	47.85613	0.0008
At most 1	0.293787	24.27882	29.79707	0.1889
At most 2	0.159426	9.669595	15.49471	0.3070
At most 3	0.054988	2.375421	3.841466	0.1233

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.610651	39.61773	27.58434	0.0009
At most 1	0.293787	14.60923	21.13162	0.3172
At most 2	0.159426	7.294174	14.26460	0.4549
At most 3	0.054988	2.375421	3.841466	0.1233

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Uji Kausalitas Granger

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 03/17/17 Time: 22:59

Sample: 2005Q1 2015Q4

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DLNGOV does not Granger Cause DINF	42	0.00096	0.9754
DINF does not Granger Cause DLNGOV		16.0953	0.0003
DLNJUB does not Granger Cause DINF	42	0.69226	0.4105
DINF does not Granger Cause DLNJUB		0.07077	0.7916
DR does not Granger Cause DINF	42	9.75742	0.0034
DINF does not Granger Cause DR		18.7139	0.0001
DLNJUB does not Granger Cause DLNGOV	42	4.88726	0.0330
DLNGOV does not Granger Cause DLNJUB		0.39712	0.5323
DR does not Granger Cause DLNGOV	42	24.4687	0.0001
DLNGOV does not Granger Cause DR		4.19565	0.0473
DR does not Granger Cause DLNJUB	42	0.38349	0.5393
DLNJUB does not Granger Cause DR		0.38780	0.5371

Uji VECM

Vector Error Correction Estimates

Date: 03/17/17 Time: 23:46

Sample (adjusted): 2005Q4 2015Q4

Included observations: 41 after adjustments

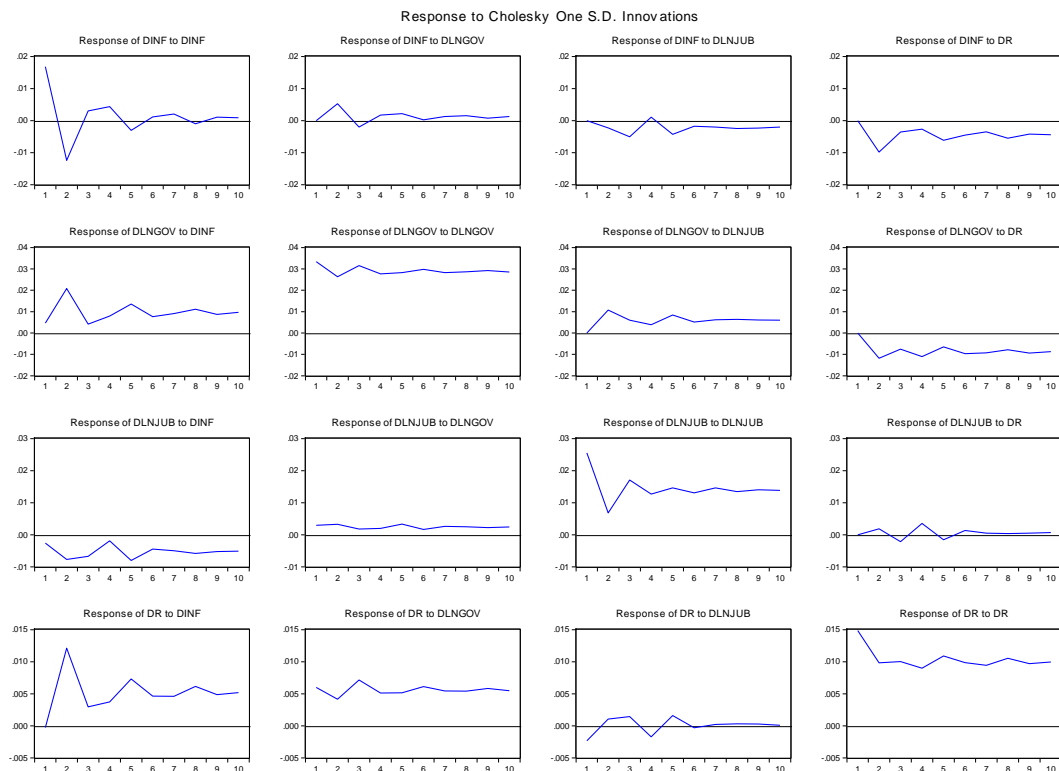
Standard errors in () & t-statistics in []

Cointegrating Eq:	CointEq1			
DINF(-1)	1.000000			
DLNGOV(-1)	-0.115598 (0.03128) [-3.69517]			
DLNJUB(-1)	0.188346 (0.08649) [2.17767]			
DR(-1)	0.346965 (0.10066) [3.44687]			
C	-0.003245			
Error Correction:	D(DINF)	D(DLNGOV)	D(DLNJUB)	D(DR)
CointEq1	-2.385179 (0.25567) [-9.32904]	1.724621 (0.53457) [3.22616]	-1.145842 (0.39675) [-2.88807]	1.188291 (0.24833) [4.78518]
D(DINF(-1))	0.494288 (0.16547) [2.98716]	-0.684999 (0.34598) [-1.97991]	0.729146 (0.25678) [2.83961]	-0.407778 (0.16072) [-2.53724]
D(DLNGOV(-1))	-0.000934 (0.07657) [-0.01219]	0.095524 (0.16010) [0.59664]	-0.115112 (0.11883) [-0.96874]	0.136818 (0.07437) [1.83960]
D(DLNJUB(-1))	0.317306 (0.08581) [3.69781]	-0.030765 (0.17941) [-0.17148]	-0.474164 (0.13316) [-3.56091]	-0.142266 (0.08334) [-1.70697]
D(DR(-1))	0.179194 (0.19512) [0.91836]	-1.364978 (0.40798) [-3.34573]	0.634913 (0.30279) [2.09686]	-0.759923 (0.18952) [-4.00976]
C	-0.000295 (0.00257) [-0.11470]	-0.001729 (0.00537) [-0.32201]	-0.001458 (0.00399) [-0.36581]	0.000668 (0.00249) [0.26773]
R-squared	0.857081	0.498396	0.519374	0.609058
Adj. R-squared	0.836664	0.426738	0.450713	0.553210
Sum sq. resids	0.009356	0.040900	0.022529	0.008826
S.E. equation	0.016350	0.034185	0.025371	0.015880
F-statistic	41.97869	6.955219	7.564330	10.90549
Log likelihood	113.7229	83.48241	95.70702	114.9180

Akaike AIC	-5.254774	-3.779630	-4.375952	-5.313074
Schwarz SC	-5.004007	-3.528863	-4.125185	-5.062307
Mean dependent	-0.000171	-0.002368	-0.000653	4.63E-05
S.D. dependent	0.040454	0.045149	0.034233	0.023757

Determinant resid covariance (dof adj.)	4.05E-14
Determinant resid covariance	2.15E-14
Log likelihood	412.4541
Akaike information criterion	-18.75386
Schwarz criterion	-17.58362

Impulse Response Function (IRF)



Variance Decomposition

Variance Decomposition

